

2021 Laporan Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 dapat terlaksana.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung ini bertujuan untuk melaporkan akuntabilitas sekaligus melaporkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang menjadi tolok ukur kebertanggungjawaban suatu instansi dalam upaya mencapai tujuan serta kemajuan menjalankan misi organisasi.

Dengan telah terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 ini, kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung di Tahun Anggaran 2021 dan untuk menjadi acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun 2022 yang akan datang.

Tanjungpandan, Maret 2022
Kepala Dinas,



KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Utama Muda
NIP. 196908241990031004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	6
1.3 Isu-Isu Strategis	15
1.4 Dasar Hukum	15
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis	22
2.2 Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan	23
2.3 Indikator Kinerja Utama	40
2.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)	41
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	41
2.6 Rencana Anggaran	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja PD Pada Tahun 2021	46
3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja 2018-2023	48
3.3 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	51
3.4 Akuntabilitas Keuangan	111
3.5 Analisa Efisiensi	122
BAB IV PENUTUP	123
4.1 Kesimpulan Umum	123
4.2 Langkah-Langkah Perbaikan Ke Depan	124
LAMPIRAN	126

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023 tujuan dari DSPPPA adalah untuk mendukung tujuan pembangunan Bupati Belitung yaitu Tujuan pembangunan dibidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan di Kabupaten Belitung, oleh karena itulah perlunya penjabaran rencana program dan kegiatan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 Tujuan dan 3 sasaran yang memuat 3 indikator Tujuan dan 3 Indikator sasaran pada Renstra Perubahan 2018 - 2023 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Pencapaian dari 6 Indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2021 ini secara garis besar berhasil mencapai target. Hanya terdapat 1 indikator Tujuan yaitu Kabupaten Layak Anak dengan capaian 58,37% dari target 2021 sebesar 80%. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2021 terdapat penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan skor KLA 583.

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat 11 program, 18 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung/ kegiatan sebesar Rp. 8.545.324.388,- dan Realisasi Anggaran Rp. 7.727.029.736,- atau 90,42%.

Untuk itu ada beberapa langkah-langkah yang harus lebih ditekankan pada masa-masa mendatang, diantaranya :

1. Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi baik fungsional maupun Struktural.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan publik.

Pencapaian kinerja saat ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2021 ini juga merupakan bagan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang keuangan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara tentang bagaimana instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1(satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu yang akan datang.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

b. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

c. Fungsi

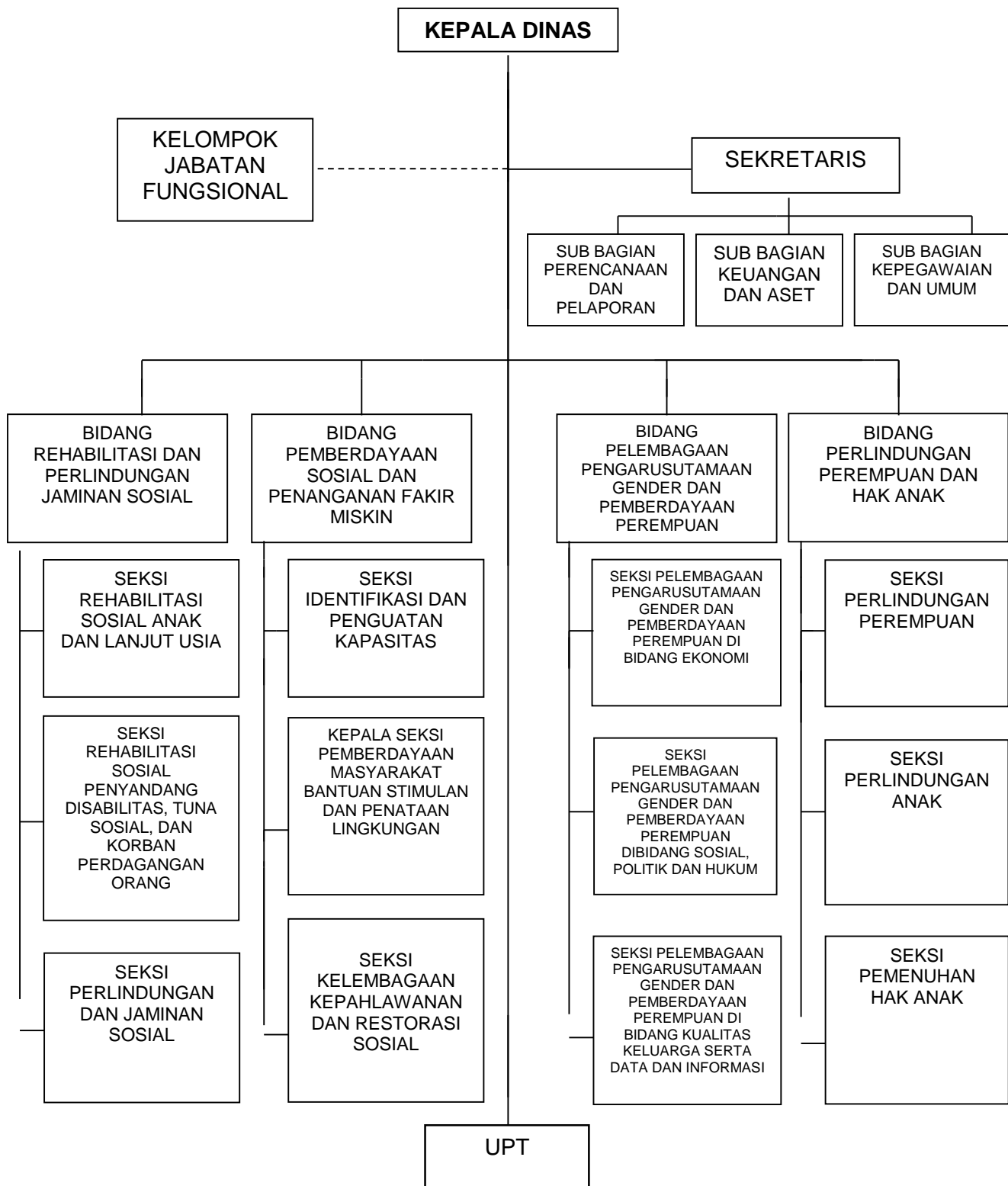
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi ASN, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat lihat melalui bagan struktur organisasi berikut ini:



Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah/negara;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- g. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, merumuskan pelaksanaan kebijakan operasional, administrasi, koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan serta penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan

- dan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - h. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jumlah pegawai pada Tahun 2021 sebanyak 45 orang terdiri dari 29 orang PNS, 16 Orang tenaga honorer.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Pendidikan
Per 31 Desember 2021

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI						JUMLAH	
		PNS		CPNS		HONORER		L	P
		L	P	L	P	L	P		
I	TENAGA SARJANA								
1	S2 Manajemen Ekonomi Publik	1	0					1	0
2	Sarjana Sosial / Kesejahteraan Sosial / Kessos Umum	0	1					0	1
3	Sarjana Ilmu Sosial Politik	0	1					0	1
4	Sarjana Agama Islam	1	0					1	0
5	Sarjana Administrasi Negara	3	3					3	3
6	Sarjana Hukum / Ilmu	1	0					1	0

	Hukum								
7	Sarjana Sosiologi	0	1			1	0	1	1
8	Sarjana Pekerjaan Sosial	0	1					0	1
9	D - IV Pekerja Sosial	1	0					1	0
10	Sarjana Psikologi	2	2					2	2
11	Sarjana Hubungan Internasional					0	1	0	1
12	D4 Manajemen Informatika					1	0	1	0
13	Sarjana PGSD / Penjas					2	0	2	0
Total		9	9	0	0	4	1	13	10

II	TENAGA SARJANA MUDA /AKADEMI/D3								
1	D3 Sosiatri	0	1					0	1
2	D3 Manajemen Informatika	0	2					0	2
	D3 Perpajakan	0	1					0	1
	D3 Akuntansi	0	1					0	1
3	D3 Manajemen Administrasi Perkantoran					0	1	0	1
Total		0	5			0	1	0	6
III	SEKOLAH MENENGAH ATAS								
1	SMA/ SMU	3	2			4	3	7	5
2	SMEA/ SMK	0	0			1	1	1	1
3	STM	0	0					0	0
4	SMKK	0	1					0	1
5	SMP	0	0			1	0	1	0
Total		3	3			6	4	9	7
JUMLAH TOTAL		12	17	0	0	10	6	22	23

1.3 ISU ISU STRATEGIS

Salah satu dasar penyusunan Renstra PD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan pemetaan dan telaahan atas hasil kegiatan dan diskusi serta rapat pembahasan penyiapan renstra. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

1.4. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan /Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama

- Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015 – 2019;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

41. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
42. Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
43. Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program untuk pencapaian sasaran untuk mendukung visi dan misi Bupati yang sesuai tema, prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun;

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penanganan PMKS, dengan indikator sasaran :

- Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS dikali 100%.

- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, dengan indikator sasaran :

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

- 3) Terpenuhinya Hak Anak dengan Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA); Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas hidup anak, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap anak;
- 4) Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran :
 - Indeks kepuasan.

2.2. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas kinerja aparatur;

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial;
4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
5. Peningkatan peran anak dalam pembangunan
6. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
7. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;
8. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023

Visi : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023			
Misi I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1. Meningkatnya penanganan PMKS	1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin; 3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	1. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
3. Terpenuhinya Hak Anak	1. Meningkatnya kualitas hidup Anak	1. Peningkatan Pelembagaan Forum Anak dan peningkatan	1. Peningkatan peran anak dalam pembangunan

		Kabupaten Layak Anak	
--	--	----------------------	--

Misi II : Meningkatnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	1. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.
		2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur	1. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur. 2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

Program

Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan dalam tahun 2021 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Program Perlindungan Perempuan;
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
11. Program Perlindungan Khusus Anak.

Kegiatan

Sementara kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Dalam penyusunan Rencana Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021, dimana sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan memuat informasi yang meliputi:

- a. Indikator Kinerja
- b. Rencana Tingkat Capaian (Target)
- c. Program yang akan dilaksanakan
- d. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program
- e. Indikator Kinerja kegiatan, antara lain:
 - Masukan (input)
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Out Comes)

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
7. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

- Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
8. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 9. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
 11. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota;
 14. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 15. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 17. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 18. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan dan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2021.

Terdapat 41 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2021, dijabarkan dalam tabel 2.2. dibawah ini.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran terdapat dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS Per tahun	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial
							1. Penyediaan Permakanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian permakanan pada lanjut usia ▪ Pemberian permakanan kepada penyandang disabilitas ▪ Panti yang diberikan bantuan permakanan
							2. Penyediaan Alat Bantu	Alat bantu bagi penyandang disabilitas
							3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan reunifikasi keluarga lanjut usia terlantar

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas
							4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada anak terlantar ▪ Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas
							Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan rehabilitasi sosial
							1. Penyediaan Permakanan	Jumlah permakanan bagi PMKS lainnya
							2. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya penelusuran keluarga PMKS lainnya di luar panti

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100%	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat
							1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten sebesar 100%	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana yang menerima bantuan sosial
							1.Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan pembinaan TAGANA dan Relawan KSB (Kampung Siaga Bencana)
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/	Terlaksananya pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
						sebesar 100%	Kota	
							1.Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik
2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 53%	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan PUG
							1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya program kerja organisasi perempuan ▪ Kelembagaan PUG
					Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 5,5	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak ▪ Terlaksananya webinar

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> perindungan perempuan dan anak ▪ Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor ▪ Tersedianya materi KIE
							Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terfasilitasi
							1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah lembaga ▪ Operasional pendampingan pelayanan KtPA/TPPO
							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terfasilitasinya pelaksanaan visum dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk korban KtP/A ▪ Terlaksananya pendampingan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
								<p>n dan penjangkauan korban KtP/A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya pendampingan oleh tenaga ahli terhadap korban KtP/A
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Sebanyak 25%	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak
							1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Data terpilah dan informasi gender dan anak
3.	Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan status KLA
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Anak Kabupaten Belitung
							1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Anak
							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Anak
							3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan Sebanyak 100%	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek
							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peserta bimtek ▪ Terbinanya PATBM di Desa/ Kel
4.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
	berkualitas							
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah
							2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN
							2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor
							3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor
							5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan
							6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
							7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran
							1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah materai • Jumlah barang / surat yang dikirim
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
							3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Non PNS Sopir • Tenaga Non PNS Cleaning Service • Tenaga Non PNS Penjaga

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
								Malam
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik
							1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan perorangan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara • Kendaraan perorangan dinas/ kendaraan roda 2/3 yang dipelihar
							2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin lainnya yang dipelihara
							3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan menjadi satu dalam pentapan Indikator Kinerja Utama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut baru dilakukan pada bulan Agustus 2019 dan perubahannya pada bulan Desember 2021, sedangkan untuk perencanaan kinerja tahun berjalan (Renja 2021) telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (2020) sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan dengan yang ditetapkan namun dapat disesuaikan.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Belitung dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Adapun IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2018 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kineja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS		Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kineja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%	80%	80%	80%	80%
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	42,62	43,91	45,11	46,35	47,00
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	7,89	5,7	5,5	5,3	5,1
3.	Terpenuhinya hak anak		Kabupaten Layak Anak (KLA)	70	75	80	83	85
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	5,0	4,8	4,6	4,4

2.4 RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

Sesuai dengan Rencana Kinerja untuk satuan dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021, maka Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tertuang dalam format Rencana Kerja Tahunan (Renja) terlampir. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada terdapat kendala karena faktor pandemi covid 19 sehingga harus ada penyesuaian anggaran dan kegiatan.

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1.	Tujuan :			
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5
1.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%
2.1.	Tujuan :			
1	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,11
2.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,5
3.1.	Tujuan :			
1	Terpenuhinya hak anak	5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama (80%)
3.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup anak	6.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,8

2.6 RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, melalui indikator kinerja masing-masing sasaran strategis maka pada tahun anggaran 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dengan anggaran induk belanja langsung sebesar Rp. 4.501.298.150,- Anggaran tersebut mengalami perubahan dalam mekanisme Perubahan APBD tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp. 3.970.258.500.-

Adapun anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis per Bidang Urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Langsung per Tujuan/Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	
		2020	2021
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya penanganan PMKS	2.706.863.940	2.936.858.445
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	552.467.500	839.384.980
2	Tujuan: Terpenuhi hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	245.274.000	194.015.075
JUMLAH		3.504.605.440	3.970.258.500.-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2021, Renja Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja

Persentas e	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana tabelberikut:

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 CAPAIAN KINERJA PD PADA TAHUN 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Tahun 2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPJMD yaitu ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.***

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja
1.1.1	Tujuan : 1 Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	-8,79	-1758	Kurang
1.1.2	Sasaran Strategis : 2 Meningkatkan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	97,69%	122,11	Sangat Baik
2.1.1	Tujuan : 1 Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,11	53,11	117,73	data 2021 masih sama dengan 2020 (data belum muncul dari BPS)
2.1.2	Sasaran Strategis : 2 Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,5	4,13	75,09	Baik (Indikator Negatif)
3.1.1	Tujuan : 1 Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	80%	58,37%	72,96	Cukup
3.1.2	Sasaran Strategis : 2 Meningkatkan kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,8	1,81	37,71	Sangat Baik (Indikator Negatif)

3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2023

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yangberikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.1. Tujuan Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	-	5,93	-5,01	-8,79			1186	1002	- 1758		
1.2. Sasaran Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS yang tertangani	73,85 %	83,89	94,78	97,6 9			104,86	118,48	122, 11		
2.1. Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	88,62 54,27	88,62 43,07	88,28 53,11	- 53,1 1			100,72 101,06	100,3 120,95	- 117, 73		
2.2. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	-	8,17	3,09	4,13			103,55	54,21	75,0 9		

3.1. Tujuan Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	60,9	60,9	58,37			87	81,20	72,96		
3.2. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	2,84	1,81			-	56,8	37,71		

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 Berdasarkan Persentase

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	2
>100	Melebihi target	2

Dengan demikian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yakni:

- Persentase penurunan PMKS per tahun, dimana hasilnya minus 8,79 dari target penurunan sebesar 0,5. Hal ini tidak terjadi penurunan jumlah PMKS pada tahun 2021 melainkan mengalami kenaikan dari tahun 2020, yaitu dari jumlah 13631 menjadi 14829. Hal ini dikarenakan adanya dampak pandemi covid sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS terutama untuk PMKS Fakir Miskin.
- Dan Indikator kedua yaitu Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan capaian 58,37% dari target 80%, namun nilai ini masih dalam predikat pratama. Nilai capaian ini didapat dari penilaian mandiri yang diverifikasi oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021.

Indikator kinerja yang pencapaiannya sesuai target ada 2 (dua) indikator yakni: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dengan capaian 4,13 dari target 5,5 dan Indikator kekerasan terhadap anak dengan capaian 1,81 dari target 4,8. Walaupun persentase pencapaiannya 75,09% dan 37,71% namun secara kinerja indikator ini berhasil mencapai target karena jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak dibawah target 2021 (Indikator negatif).

Sedangkan ada 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target yaitu :

- Indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan capaian 97,69% dari target 80%. Indikator ini memuat dari jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS keseluruhan (26 jenis PMKS) dikali 100%
- Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IDG tahun 2021 adalah 53,11 dari target 45,11. Nilai ini sama dengan tahun 2020, dikarenakan untuk nilai IDG tahunm 2021 belum realise dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Jika dilihat berdasarkan katagori maka capaian kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	1
4	Kurang	50 – 64,99	1
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.5 diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun 2021 berada pada katagori "**Sangat Baik**"(capaian >90) yang dicapai pada 3 (tiga) indicator. Terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori Baik, 1 (satu) indikator dengan kategori cukup dan 1 (satu) indikator dengan kategori kurang. Dengan demikian jika dilihat dari katagori yang ada secara umum kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam katagori "**Baik**".

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian (Target), tetapi juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat Keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Keberhasilan dari Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 ditunjukkan dengan tercapainya rencana tingkat capaian (target) baik Program, Kegiatan, Sub Kegiatan maupun Sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 yang ditandatangani tanggal Januari 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2021 telah ditetapkan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
**Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas
 Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Anak Kabupaten Belitung**

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1.	Tujuan :			
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5
1.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%
2.1.	Tujuan :			
1	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3.	• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,11
2.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,5
3.1.	Tujuan :			
1	Terpenuhinya hak anak	5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama (80%)
3.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup anak	6.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,8

Gambaran perbandingan tujuan/ sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.8

**Tujuan/Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung**

Tujuan 1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	2 indikator
Strategis 1	Meningkatnya penanganan PMKS	
Tujuan 2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	2 indikator
Strategis 2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	
Tujuan 3	Terpenuhinya hak anak	2 indikator
Strategis 3	Meningkatnya kualitas hidup anak	

Dengan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 2 (dua) indikator tercapai melebihi target, 2 (dua) indikator mencapai sesuai target, 2 (dua) indikator belum tercapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9

**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata	
			Capaian Sasaran %	Predikat
1	Tujuan Strategis 1	1	-17,58	Belum mencapai target
2	Sasaran Strategis 1	1	122,11	Tercapai melebihi target
3	Tujuan Strategis 2	1	117,73	Tercapai melebihi target
4	Sasaran Strategis 2	1	75,09	Tercapai (Indikator Negatif)
5	Tujuan Strategis 3	1	72,96	Belum tercapai
6	Sasaran Strategis 3	1	37,71	Tercapai (Indikator Negatif)

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam kategori **Baik** untuk semua indikator baik pada indikator **tujuan** maupun indikator **sasaran**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1	Tujuan Strategis 1	1	-1758		√			
2	Sasaran Strategis 1	1	122,11					√
3	Tujuan Strategis 2	2	117,73					√
4	Sasaran Strategis 2	1	75,09				√ (Indikator Negatif)	
5	Tujuan Strategis 3	1	72,96			√	√	
6	Sasaran Strategis 3	1	37,71					√ (Indikator Negatif)

Tujuan/Sasaran strategis 1

Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan PMKS

Sasaran 1 : Meningkatkan penanganan PMKS

Tujuan Stategis 1 **Meningkatnya kesejahteraan PMKS** Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya penanganan PMKS** dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitasHidup

Masyarakat Yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Persentase penurunan PMKS per tahun**, yang targetnya pada tahun 2021 adalah 0,5 di Kabupaten Belitung
2. **Persentase PMKS yang tertangani**, pada tahun 2021 ditargetkan 80% di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 1 dan sasaran 1, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 560,24% dan termasuk kategori **sangat baik**.

Tabel 3.11
**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
 Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Satuan							
1	Tujuan: % Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	-5,01	0,5	-8,79	-1002%	-1758%
2	Sasaran: Persentase penanganan PMKS %	80%	94,78%	80%	97,69%	118,48%	122,11%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						560,24%	940,06%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 1 **Meningkatnya kesejahteraan PMKS** dan Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya penanganan PMKS tahun 2020** adalah sebesar 560,24% dan tahun 2021 sebesar 940,06%, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian harus terus meningkatkan upaya lagi di tahun berikutnya agar target kinerja dari indikator-indikator tersebut pada tahun 2022 bisa terus masuk dalam kriteria Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2020	2021		
1	Persentase penurunan PMKS per tahun	%	-5,01	-8,79	3,78	
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	94,78	97,69	2,91	

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

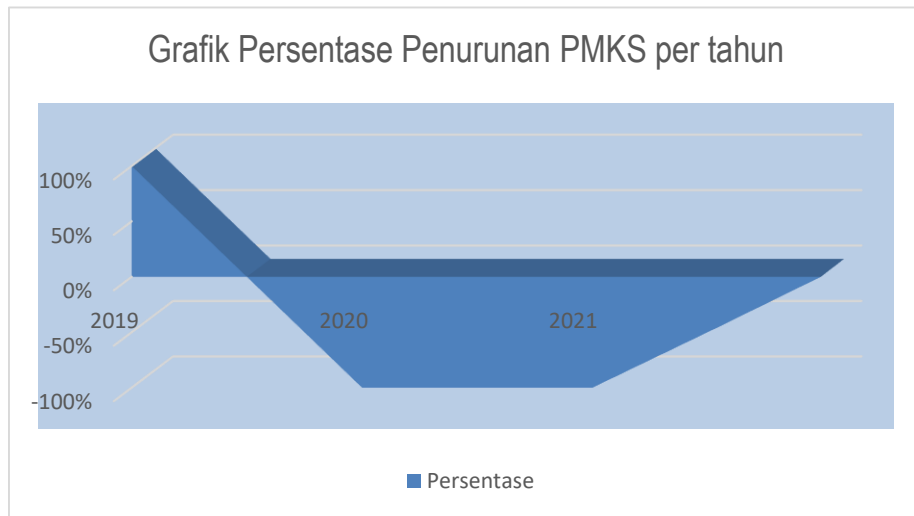
Tabel 3.13.

**Pencapaian Tujuan/ Sasaran
Persentase Penurunan PMKS per Tahun**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Persentase penurunan PMKS per tahun	-5,01	0,5	-8,79	-1758	0,5	-1758
2	Persentase PMKS yang tertangani	94,78	80	97,69	122,11	80	122,11

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1). Persentase penurunan PMKS per tahun



Grafik 3.1. Persentase penurunan PMKS per tahun

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran “Persentase penurunan PMKS per tahun” dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, nilai minus disini dimaksudkan PMKS tidak mengalami penurunan pertahunnya, melainkan terjadi peningkatan jumlah PMKS. Untuk jumlah PMKS tahun 2019 sebesar 14337, tahun 2020 jumlah PMKS sebesar 13631, dan tahun 2021 jumlah PMKS sebesar 14.829. Jumlah PMKS sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dari 14337 menjadi 13631, namun kini meningkat kembali.

Jika dimasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan dalam IKU Perubahan Tahun 2018-2023 yaitu (Jumlah PMKS tahun n-1 dikurangi Jumlah PMKS tahun n) dibagi jumlah PMKS tahun n-1 dikali 100%. Maka didapatkan nilai minus 5,01 untuk tahun 2020 dan minus 8,79 untuk tahun 2021.

Peningkatan jumlah PMKS ini terjadi dikarenakan adanya dampak pandemi Covid sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS terutama untuk fakir miskin.

Faktor pendukung yaitu adanya sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ Komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat.

Sementara faktor penghambat dari pencapaian target yaitu adanya data

PMKS yang belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kesoos, anggaran dan sarana prasarana.

Dan Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan verifali data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Pencapaian Tujuan pertama ini juga didukung oleh Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya penanganan PMKS.

2). Meningkatnya penanganan PMKS

Untuk mengukur kualitas meningkatnya penanganan PMKS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator yaitu Persentase PMKS yang tertangani.

Pada indikator ini pengukuran yang dilakukan adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 3.14

Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS

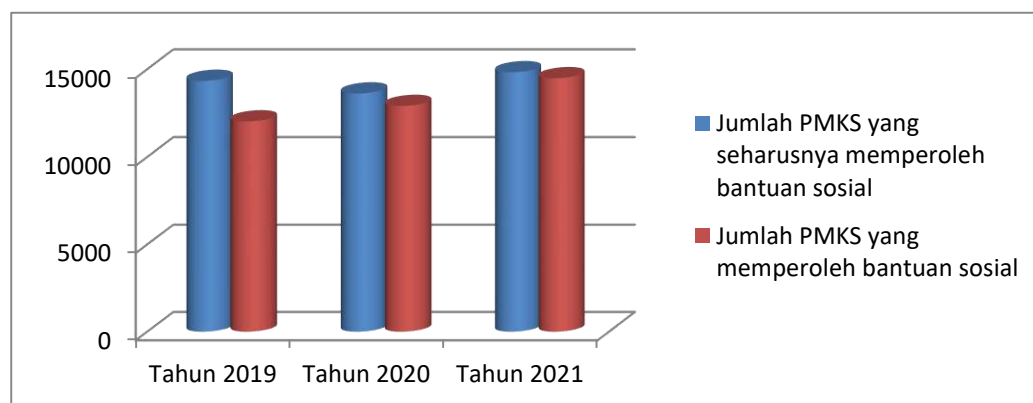
Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan social	%
2019	14.337	12.028	83,89%
2020	13.619	12.908	94,78%
2021	14.829	14.487	97,69%

Pada tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa dari pelayanan dan penanganan PMKS dalam 3 tahun terakhir meningkat persentasenya walaupun jumlah PMKSnya bertambah.

Jumlah PMKS pada tahun 2019 jumlah PMKS yaitu 14.337 Orang yang mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial sebanyak 12.028 orang atau 83,89% menurun dari tahun sebelumnya, dan tahun 2020 jumlah PMKS menurun yaitu 13.619 orang yang memperoleh bantuan sosial meningkat menjadi 12.908 dari sebelumnya 12.028 orang atau sebesar 94,78%, dan pelayanannya meningkat sebesar 10,89%. Dan ditahun 2021 jumlah PMKS kembali meningkat sebesar 14.829 dan jumlah tertangani sebesar 14.487 dengan persentase 97,69%. persentase penanganan PMKS juga dapat

digambarkan dalam grafik 3.2. berikut ini :

Grafik 3.2.
Persentase PMKS skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2019 - 2021



Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa penanganan PMKS meningkat dari tahun sebelumnya yaitu meningkat 10,89% tahun 2020 dan 2,91% ditahun 2021. Meningkatnya penanganan PMKS ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus penanganan PMKS mendukung Standar Pelayanan Minimal, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti.

Dengan meningkatnya pemberian bantuan tersebut dan fokus penanganan untuk pelayanan SPM maka persentase penanganan PMKS meningkat melebihi target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dalam capaian Tujuan/ Sasaran ini yaitu data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Tabel 3.15.

**Data Jumlah PMKS seluruhnya dan jumlah PMKS yang dibantu
berdasarkan jenis PMKS Tahun 2020**

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang/KK)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang/KK)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Fakir Miskin, Lansia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	11463	11463	100.00
2	Penyandang Disabilitas (PACA)	612	125	20.42
3	Lansia Terlantar	1163	1121	96.39
4	Anak Balita Terlantar	0	0	-
5	Anak Terlantar	219	70	31.96
6	Anak yang berhadapan dengan Hukum	6	6	100.00
7	Anak Jalanan	0	0	-
8	Anak dengan Disabilitas	43	10	23.26
9	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	9	9	100.00
10	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (APK) / Kebutuhan Khusus	6	6	100.00
11	Tuna Susila	0	0	-
12	Gelandangan	0	0	-
13	Pengemis	0	0	-
14	Pemulung	0	0	-
15	Kelompok Minoritas	0	0	-
16	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	n/a	n/a	-
17	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100.00
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100.00
19	Korban Trafficking	0	0	-
20	Korban Tindak Kekerasan	28	28	100.00
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	18	18	100.00
22	Korban Bencana Alam	20	20	100.00
23	Korban Bencana Sosial	12	12	100.00
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	-
25	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
26	dan Lain-lain	0	0	-
Jumlah		13619	12908	94.78

Tabel 3.16
Data Jumlah PMKS seluruhnya dan jumlah PMKS yang dibantu
Berdasarkan Jenis PMKS
Tahun 2021

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Anak Balita Terlantar	71	71	100,00
2	Anak Terlantar	219	219	100,00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	15	15	100,00
4	Anak Jalanan	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	37	12	32,43
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	10	10	100,00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	15	15	100,00
8	Lanjut Usia Terlantar	1163	1163	100,00
9	Penyandang Disabilitas	612	295	48,20
10	Tuna Susila	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-
12	Pengemis	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100,00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	6	6	100,00
18	Korban Trafficking	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	40	40	100,00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	12	12	100,00
21	Korban Bencana Alam	32	32	100,00
22	Korban Bencana Sosial	17	17	100,00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1096	1096	100,00
24	Fakin Miskin	11463	11463	100,00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	5	100,00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
Jumlah		14829	14487	97,69

Capaian Tujuan/Sasaran 1 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Untuk pencapaian indikator **Program Rehabilitasi Sosial** pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Pencapaian Indikator Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tahun 2021 sebesar 100% dimana jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berjumlah 1419 orang. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus dalam penanganan PMKS terutama untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial.

Faktor Pendorong: Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar minimal kepada Masyarakat, Amanat Peraturan Perundang-undangan.

Faktor Penghambat: Rendahnya komitmen dalam pemenuhan pelayanan minimal, belum terpenuhinya sarana dan prasarana, Belum terpenuhinya

sarana dan prasarana yang memadai, belum adanya Rumah Pelayanan Sosial, kendaraan operasional dalam penanganan PMKS, data PMKS yang belum valid dan keterbatasan SDM Kesejahteraan Sosial.

Solusi yang dilakukan adalah

- 1) Mengusulkan Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2023.
- 2) Memverifikasi dan verifikasi data PMKS secara berkala.
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek.

Capaian indikator kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Rehabilitasi Sosial adalah sebesar Rp. 644.553.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 578.843.599,- setara dengan 89,81% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 464.772.500,- dan realisasi sebesar Rp. 439.143.710,- atau setara dengan 94,49%. *Output* kegiatan adalah jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
Faktor Pendorong: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang memerlukan pelayanan dasar minimal).

Faktor Penghambat: Terbatasnya jenis layanan yang disediakan

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.666.800,- dan

realisasi sebesar Rp. 203.930.330,- atau setara dengan 96,80%. *Output* sub kegiatan adalah pemberian permakanaan pada lanjut usia, disabilitas terlantar dan panti.

Faktor Pendorong: Tidak terpenuhinya standar gizi bagi penerima layanan / PPKS.

Faktor Penghambat: Belum terpenuhinya standar jumlah dan kualitas barang bantuan sesuai dengan standar gizi minimal yang diperlukan oleh seseorang.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.992.500,- dan realisasi sebesar Rp. 54.655.000,- atau setara dengan 99,39%.

Output sub kegiatan adalah alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Faktor Pendorong: Banyaknya Penyandang Disabilitas yang membutuhkan akses alat bantu.

Faktor Penghambat: terbatasnya tenaga ahli untuk memberikan akses alat bantu sesuai dengan kebutuhan.

- c. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 126.500.000,- atau setara dengan 95,83%. *Output* sub kegiatan adalah pelayanan reunifikasi keluarga lanjut usia terlantar dan disabilitas terlantar.

Faktor Pendorong: Tersedianya pendamping sosial

Faktor Penghambat: Adanya refocusing anggaran, Adanya Pandemi Covid-19 sehingga keterbatasan dalam mengumpulkan massa.

- d. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.113.200,- dan realisasi sebesar Rp. 54.058.380,- atau setara dengan 80,55%. *Output* sub kegiatan adalah bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada lanjut usia, anak dan disabilitas terlantar.

Faktor Pendorong: Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(Pekerja Sosial dan Pendamping Sosial, Adanya data Anak Terlantar yang memerlukan layanan dasar.

Faktor Penghambat: Adanya refocusing anggaran, Adanya Pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan PPKM dan keterbatasan dalam mengumpulkan massa.

(2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.780.900,- dan realisasi sebesar Rp. 139.699.889,- atau setara dengan 77,71%. *Output* kegiatan adalah Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan rehabilitasi sosial. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti.

Faktor Pendorong: Banyaknya masyarakat yang memerlukan layanan Rumah Singgah dan Pemulangan bagi Pekerja Migran Terlantar kembali ke daerah asalnya.

Faktor Penghambat: belum tersedianya Tim Reaksi Cepat dalam penanganan PPKS, tidak tersedianya kendaraan mobilisasi jangkauan layanan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.775.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.722.500,- atau setara dengan 47,14%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah permakanan bagi PMKS lainnya. Sub kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan ini bersifat antisipatif dan insendental tergantung dengan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani (orang terlantar/ pekerja migran terlantar di Kabupaten Belitung).

Faktor Pendorong: Adanya kebutuhan penyediaan permakanan bagi Pekerja Migran / Orang Terlantar.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya Rumah Singgah/Rumah Perlindungan dan Pelayanan Sosial.

b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.005.900,- dan realisasi sebesar Rp. 136.977.389,- atau setara dengan 78,72%. *Output* sub kegiatan adalah Terlaksananya penelusuran keluarga PMKS lainnya di luar panti. Realisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan ini bersifat antisipatif dan insidental tergantung dengan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani yaitu pemulangan orang terlantar/ pekerja migran terlantar di Kab. Belitung ke daerah asalnya, serta bekerjasama antar program dari instansi terkait.

Faktor Pendorong: Adanya kebutuhan Rumah Singgah di Jakarta, Banyaknya Pekerja Migran yang mengalami Keterlantaran di Kabupaten Belitung yang akan dipulangkan ke daerah asalnya.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya Rumah Singgah/Rumah Perlindungan dan Pelayanan Sosial di Kabupaten Belitung.

2. Program Penanganan Bencana

Indikator Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.

Untuk pencapaian indikator **Program Penanganan Bencana** pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Pencapaian Indikator Program Penanganan Bencana Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Penanganan Bencana	Persentase korban benana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	100	100	

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten tahun 2021 yaitu 100%. Dimana jumlah korban bencana yang terjadi di tahun 2021 yaitu 49 korban bencana.

Faktor Pendorong: Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar minimal kepada Korban Bencana, Amanat Peraturan Perundang-undangan. Faktor Penghambat: Terbatasnya Anggaran.

Alokasi anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 589.319.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 537.086.356,- setara dengan 91,13% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 589.319.860,- dan realisasi sebesar Rp. 537.086.356,- atau setara dengan 91,14%. *Output* kegiatan adalah korban bencana yang menerima bantuan sosial. *Outcome* kegiatan terlayannya korban bencana.

Faktor Pendorong: Adanya relawan-relawan sosial dalam penanggulangan bencana

Faktor Penghambat: Standar Operasional Pelayanan Kebencanaan yang belum terintegrasi.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 589.319.860,- dan realisasi sebesar Rp. 537.086.356,- atau setara dengan 91,14%. *Output* sub kegiatan adalah laporan pembinaan tagana dan relawan KSB (Kampung Siaga Bencana).

Faktor Pendorong: Dapat dilaksanakannya koordinasi serta simulasi kebencanaan.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya anggaran dan peralatan kebencanaan yang memadai.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Program Pemberdayaan Sosial adalah (1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif; (2) Persentase KUBE/ UEP Fakir Miskin berkembang.

Untuk pencapaian indikator **Program Pemberdayaan Sosial** pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100	98,18	98,18	
	2. Persentase KUBE/UEP Fakir Miskin berkembang	90	0	0	

- Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif tahun 2021 sebesar 98,18% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 90%. Persentase ini didapatkan dari rumus jumlah PSKS aktif dibagi dengan jumlah PSKS terdata dikali 100 persen. Capaian persentase ini masih sama nilainya dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 162 PSKS aktif dari 165 jumlah PSKS aktif.

Faktor pendukung yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat.

Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu

melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

- Persentase (%) KUBE/ UEP Fakir Miskin berkembang tahun 2021 sebesar 0% dari target 90%. Persentase ini didapat dari rumusan jumlah KUBE dan/atau UEP Fakir Miskin yang dibantu / Jumlah KUBE/UEP fakir miskin dikali 100%. Tidak tercapainya target ini pada Tahun 2021, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tidak melaksanakan Program atau Kegiatan ini terkait rasionalisasi dan refocusing anggaran karena Pandemi. Sedangkan kuota KUBE / UEP untuk Kabupaten Belitung yang bersumber dari Dana Dekon juga tidak ada, sehingga nilai capaian nol. Target ini sudah pernah diusulkan untuk dinolkan pada anggaran perubahan, namun karena miss komunikasi sehingga target masih muncul dalam RKPD Perubahan Tahun 2021.

Untuk tahun 2020 Bantuan KUBE / UEP Perkotaan dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin (DID Tambahan Periode 2).

Faktor penghambat yaitu karena adanya PPKM selama tahun 2021, dan refocusing anggaran sehingga menyebabkan kegiatan tidak berjalan. Faktor pendorong, adanya data terintegrasi calon penerima bantuan yaitu DTKS.

Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 487.712.385,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.212.400,- setara dengan 62,99% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 487.712.385,- dan realisasi sebesar Rp. 307.212.400,- atau setara dengan 62,99%. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah PSKS yang aktif.

Faktor pendukung yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat.

Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan verifikasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.929.475,- dan realisasi sebesar Rp. 139.931.410,- atau setara dengan 88,05%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah tenaga kesejahteraan sosial, jumlah BPNT dan PKH yang terfasilitasi.

Faktor pendukung : adanya tenaga pendamping/SDM program BPNT dan PKH yang terlatih, tersedianya anggaran yang memadai, meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat/KPM terkait pemanfaatan bantuan pemerintah

Faktor penghambat : tenaga pendamping/SDM program yang mengundurkan diri karena suatu kepentingan, penerapan PPKM dimasa pandemic covid 19.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236.570.350,- dan realisasi sebesar Rp. 99.997.550,- atau setara dengan 44,27%. *Output* sub kegiatan adalah penghargaan kepada veteran/pejuang. Realisasi tidak mencapai 80% dikarenakan 1. Belanja Jasa/ Uang Penghargaan Rp.3.000.000,- bagi veteran/janda veteran, pejuang/ janda pejuang 2 (dua) orang meninggal dunia An. Bpk. SELAMAT dan Ibu HERLENA AB.YUSUF tidak direalisasikan disebabkan meninggal dunia; 2. Beban Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rp.100.000.000,- DED Monumen H.AS. Hanandjoeddin gagal/

batal proses pemilihan calon penyedia sebab tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan; 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 32.356.000 bagi Non PNS ke Kabupaten Malang Jatim tidak direalisasikan karena DED Monumen H.AS. Hanandjoeddin gagal/ batal dilelang/ dilaksanakan.

Faktor pendukung : tersedianya anggaran yang memadai, tersedianya jaringan internet yang baik sehingga mendukung jalannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Faktor penghambat : berkurangnya jumlah penerima uang penghargaan, masih kurangnya pemahaman penggunaan SPSE, masih minimnya anggaran uang penghargaan yang tersedia.

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.574.200,- dan realisasi sebesar Rp. 9.693.250,- atau setara dengan 39,44%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah karang taruna yang dibina. Realisasi sub kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan 1. Terdapat Belanja ATK, Makanan dan Minuman dan Transportasi Peserta tidak direalisasikan keseluruhan, mengingat adanya PPKM; 2. Untuk kesinambungan Pembinaan tersebut Karang Taruna Kabupaten tidak menindaklanjuti/ menyampaikan rencana aktiuvitas yang berkelanjutan.

Faktor pendukung : tersedianya anggaran yang memadai,

Faktor penghambat : penerapan PPKM masa pandemi covid 19 sehingga rapat/pertemuan dalam rangka pembinaan kelembagaan tidak dapat dijadwalkan/diaksanakan sebagaimana mestinya.

- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.638.360,- dan realisasi sebesar Rp. 57.590.190,-

atau setara dengan 85,14%. *Output* sub kegiatan adalah laporan LK3.

Faktor pendukung : meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsultasi masalah keluarga ke lembaga-lembaga seperti LK3, tersedianya anggaran yang memadai,

Faktor penghambat : masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan lembaga untuk konsultasi masalah keluarganya.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk pencapaian indikator **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Pencapaian Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100	83,01	83,01	

Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial tahun 2021 sebesar 83,01% dari target 100%. Indikator program ini di dapat dari rumusan jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial yang berasal dari BPNT, PKH dan PBI berjumlah 40.993 dibagi jumlah keluarga dalam DTKS berjumlah 49.386 dikali 100%.

Faktor pendukung yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat.

Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana

prasarana. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan verifikasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut : Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 408.210.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 402.431.275,- setara dengan 98,58% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 408.210.800,- dan realisasi sebesar Rp. 402.431.275,- atau setara dengan 98,58%. *Output* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi. *Outcome* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat.

Faktor pendorong : aplikasi siks-ng yang sudah online sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaan datanya sedangkan faktor penghambat : masih ada PSM yang belum memiliki perangkat komputer untuk pengelolaan data dan jaringan yang sering lemot.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 408.210.800,- dan realisasi sebesar Rp. 402.431.275,- atau setara dengan 98,58%. *Output* sub kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat.

Faktor pendorong : aplikasi siks-ng yang sudah online sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaan datanya sedangkan faktor penghambat : masih ada PSM yang belum memiliki perangkat komputer untuk pengelolaan data dan jaringan yang sering lemot.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Taman Makam Pahlawan yang tertata.

Untuk pencapaian indikator **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

Pencapaian Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	90	90	100	

Taman Makam Pahlawan yang tertata tahun 2021 sebesar 90% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 90%. Persentase ini juga merupakan indikator program pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagai berikut : Taman Makam pahlawan yang tertata sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 4.891.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.064.500,- setara dengan 42,21% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.891.600,- dan realisasi sebesar Rp. 2.064.500,- atau setara dengan 42,21%. *Output* kegiatan adalah telaksananya pengelolaan taman makam pahlawan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya taman makam pahlawan. penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Faktor pendukung : Terdapatnya Taman Makam Pahlawan,

Faktor penghambat : masih kurangnya SDM yang mengelola Taman Makam Pahlawan, masih minimnya anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan,

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.891.600,- dan realisasi sebesar Rp. 2.064.500,- atau setara dengan 42,21%. *Output* sub kegiatan adalah taman makam pahlawan dalam kondisi baik. Realisasi sub kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan tidak direalisasikan Belanja Jasa Pemakam Veteran Rp. 2.500.000 pada Taman Makam Pahlawan Ksatria Tumbang Ganti Tanjungpandan.
- Faktor pendukung : Terdapatnya Taman Makam Pahlawan,
Faktor penghambat : masih kurangnya SDM yang mengelola Taman Makam Pahlawan, masih minimnya anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Tujuan/Sasaran strategis 2

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas hidup perempuan

Tujuan Strategis 2 **Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan**
Sasaran Strategis 2 **Meningkatnya kualitas hidup perempuan** dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

- 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),** target pada tahun 2021 adalah 45,11 di Kabupaten Belitung
- 2. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan,** target pada tahun 2021 adalah 5,5 di Kabupaten Belitung.

Hasil evaluasi capaian tujuan 2 dan sasaran 2, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 96,41% dan termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.22
**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
 Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Tujuan: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		43,91	53,11	117,73% Data 2021 belum muncul dari kementerian /BPS
2	Sasaran: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		5,5	4,13	75,96% (Indikator negatif)
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					96,41%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 2 **Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan** dan Sasaran Strategis 2 **Meningkatnya kualitas hidup perempuan** adalah sebesar 96,41% dengan Rata-rata capaian kategori sangat baik. Terdapat indikator sasaran Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang capaian kerjanya 4,13, namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif, maka target capaian indikator ini semakin sedikit kasus kekerasan terhadap perempuan maka semakin baik capaiannya.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2020	2021		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,11	53,11	-	Data 2021 memakai data 2020, (Data 2021 belum muncul dari kementerian /BPS)
2.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		3,09	4,13	1,04	Indikator negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Pencapaian Tujuan/ Sasaran
IDG dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,11	45,11	53,11	117,73	47,00	113
2.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3,09	5,5	4,13	75,09	5,10	80,98

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

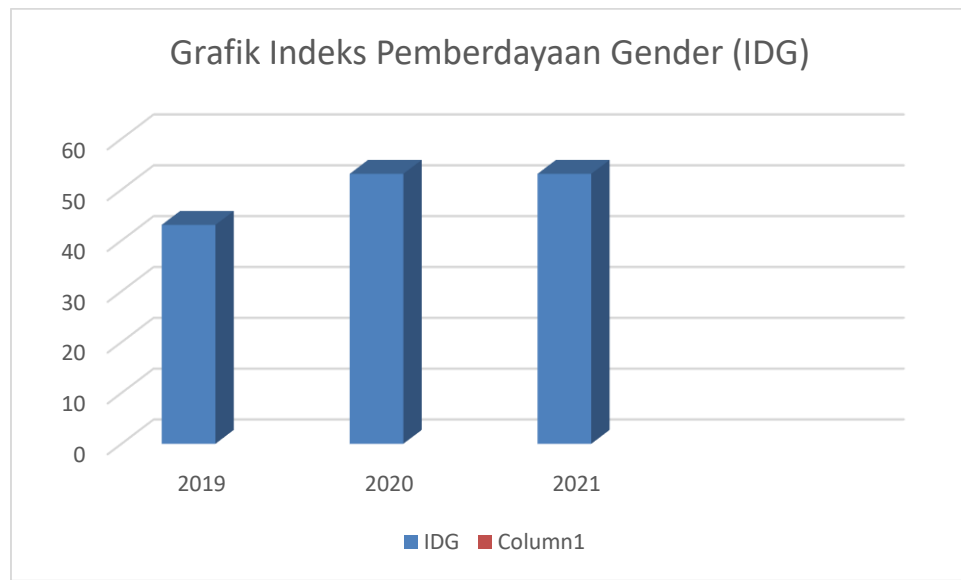
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 datanya belum tersedia baik di BPS maupun di Provinsi, untuk nilai tersebut tahun 2021 masih mengambil data IDG tahun sebelumnya yaitu 53,11. IDG ini diperoleh dari rumusan Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis, yang datanya bersumber di BPS dan Profil Data Gender. Untuk tahun 2021, IDG masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan data belum realise dari Badan Pusat Statistik.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Indikator ini merupakan indikator Tujuan yang kedua yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Capaian kinerja dari indikator ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.3. IDG Tahun 2019, 2020 dan 2021

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan indikator IDG data 2021 belum muncul dari Badan Pusat Statistik.

Untuk mencapai tujuan ini, maka didukung oleh sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

2). Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

Untuk mengukur kualitas hidup perempuan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio korban kekerasan perempuan yaitu dihitung dari Jumlah kekerasan perempuan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan > 18 tahun dikali 10.000.

Nilai capaian indikator prevalensi ini mengalami peningkatan namun masih di bawah target (indikator negatif).

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 sebesar 4,13 lebih kecil dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 5,5 dan ini merupakan indikator negatif. Pencapaian Angka kekerasan di Kabupaten Belitung Tahun 2020 dan 2021 masih ambang batas target. Prevalensi ini didapat dari rasio perempuan korban kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 10000. Jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2021 adalah 37 orang, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 18 orang.

Prevalensi kekerasan menurun menunjukkan bahwa upaya pencegahan memiliki dampak kepada kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun angka prevalensi kekerasan sendiri dapat berarti bahwa jumlah kasus yang ditangani belum menunjukkan jumlah kasus kekerasan sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kasus terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang diterima seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain. Data yang dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung.

Faktor penghambat antara lain adalah

- Tidak tersedianya UPTD PPA.
- terbatasnya tenaga ahli seperti psikolog dan pengacara untuk melaksanakan pelayanan psikososial dan hukum,
- terbatasnya SDM yang memiliki kapabilitas sebagai mediator dan melaksanakan pendampingan psikososial,
- kurang aktifnya beberapa Lembaga perlindungan PPA seperti P2TP2A dan Kelompok P-KDRT

Faktor pendukung antara lain adalah :

- Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi dari Lembaga perlindungan PPA.
- Kuatnya koordinasi antara Lembaga PPA seperti kepada Unit PPA Polres.

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengidentifikasi issue Perlindungan Perempuan dan Anak dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Capaian Tujuan/Sasaran 2 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

Untuk pencapaian indikator program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Pencapaian Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	53	57,81	109,08	

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagai berikut :

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 57,81%.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2021 yaitu 57,81% diatas target sebesar 52%. Nilai diperoleh dari pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 1876 dibagi jumlah perempuan 3245 dikali 100%. Sumber data berasal dari BKPSDM dan Pencatatan Sipil.

Capaian indikator tersebut didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Belitung melalui pemberdayaan

Pokja PUG dan PPRG, pembinaan organisasi perempuan, forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Adapun Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Alokasi anggaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebesar Rp. 284.039.940,- dengan realisasi sebesar Rp. 243.508.900,- setara dengan 85,73% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 284.039.940,- dan realisasi sebesar Rp. 243.508.900,- atau setara dengan 85,73%. *Output* kegiatan adalah kelembagaan PUG. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 284.039.940,- dan realisasi sebesar Rp. 243.508.900,- atau setara dengan 85,73%. *Output* sub kegiatan adalah terlaksananya program kerja organisasi perempuan.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

2. Program Perlindungan Perempuan

Indikator program Perlindungan Perempuan adalah rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk pencapaian indikator program perlindungan perempuan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24

Pencapaian Indikator Program Perlindungan Perempuan Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	5,5	7,21	131,1	Indikator Negatif

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tahun 2021 yaitu 7,21 lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 5,5 (indikator negatif). Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun sebesar 40 orang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 28 kasus. Indikator rasio

ini dari rumus jumlah kasus per jumlah rumah tangga dikali dengan 10.000. Rasio kasus yang lebih besar dari yang ditargetkan menjadi indikasi bahwa jumlah kasus mengalami kenaikan cukup signifikan, sehingga bisa diartikan bahwa adanya kenaikan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Belitung dan juga peran dan fungsi dari Lembaga Perlindungan Perempuan yang semakin tersampaikan kepada masyarakat. Adapun cakupan pelayanan adalah 100 persen karena seluruh kasus di Lembaga layanan PPA terlayani sesuai dengan kebutuhan kasus.

Faktor penghambat antara lain adalah

- Tidak tersedianya UPTD PPA.
- terbatasnya tenaga ahli seperti psikolog dan pengacara untuk melaksanakan pelayanan psikososial dan hukum,
- terbatasnya SDM yang memiliki kapabilitas sebagai mediator dan melaksanakan pendampingan psikososial,
- kurang aktifnya beberapa Lembaga perlindungan PPA seperti P2TP2A dan Kelompok P-KDRT

Faktor pendukung antara lain adalah :

- Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi dari Lembaga perlindungan PPA.
- Kuatnya koordinasi antara Lembaga PPA seperti kepada Unit PPA Polres.
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengidentifikasi issue Perlindungan Perempuan dan Anak dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut : Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 5,5. Alokasi anggaran Program Perlindungan Perempuan adalah sebesar Rp. 511.202.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 177.144.950,- setara dengan 34,65% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.230.000,- dan realisasi sebesar Rp. 51.775.350,- atau setara dengan 99,13%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak. *Outcome* kegiatan adalah persentase penanganan kasus.

Faktor pendukung kegiatan antara lain adalah :

- Terkoordinasinya Lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kerjasama-kerjasama dan pertemuan lintas sector.
- Pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang baik.
- Kegiatan yang dilaksanakan mengangkat issue-issue yang menjadi perhatian masyarakat.

Faktor penghambat kegiatan antara lain adalah :

- Belum tersedianya UPTD PPA yang berperan utama pada pencegahan Bersama dengan Lembaga-lembaga lintas sector lainnya.
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Belitung.
- Keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan ruang lingkup kegiatan pencegahan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.230.000,- dan realisasi sebesar Rp. 51.775.350,- atau setara dengan 99,13%. *Output* sub kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak.

Faktor pendukung kegiatan antara lain adalah :

- Terkoordinasinya Lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kerjasama-kerjasama dan pertemuan lintas sector.
- Pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang baik.
- Kegiatan yang dilaksanakan mengangkat issue-issue yang menjadi perhatian masyarakat.

Faktor penghambat kegiatan antara lain adalah :

- Belum tersedianya UPTD PPA yang berperan utama pada pencegahan Bersama dengan Lembaga-lembaga lintas sector lainnya.
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Belitung.
- Keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan ruang lingkup kegiatan pencegahan.

(2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 458.972.700,- dan realisasi sebesar Rp. 125.369.600,- atau setara dengan 27,32%. *Output* kegiatan adalah jumlah lembaga yang terfasilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan perlindungan perempuan.

Faktor pendukung yaitu adanya komitmen, relasi, dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan.

Faktor penghambat yaitu Kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas sebagai pelaksana pelayanan yang terlatih. Dan terbatasnya dan terpangkasnya sumber dana anggaran diakibatkan dampak dari pandemic, yang menyebabkan

terbatasnya ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.827.700,- dan realisasi sebesar Rp. 78.458.600,- atau setara dengan 94,73%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah lembaga.

Faktor Pendukung antara lain adalah :

- Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak didukung oleh adanya Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Adanya dasar hukum tersebut telah menjamin terselenggaranya kebijakan dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Belitung yang bertujuan agar tidak ada lagi korban kekerasan terhadap perempuan khususnya di ranah domestik atau rumah tangga. Sehingga dengan adanya dasar hukum tersebut juga membuat Pemerintah Kabupaten Belitung beserta beberapa jejaringnya membuat serta menerapkan berbagai kebijakan dan program penanganan korban kekerasan.
- Kedua, adanya komitmen, relasi, dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat membantu agar kebijakan dapat terlaksana dengan harapan yang diinginkan serta lebih membuat korban merasa cepat di respon jika mereka meminta perlindungan.

Faktor Penghambat yaitu :

- Tidak tersedianya UPTD PPA sebagai Lembaga layanan perlindungan Perempuan yang memiliki fungsi utama.
- Kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas sebagai pelaksana pelayanan yang terlatih.
- Terbatasnya dan terpangkasnya sumber dana anggaran diakibatkan dampak dari pandemic, yang menyebabkan terbatasnya ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 376.145.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.911.000,- atau setara dengan 12,47%. *Output* sub kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan visum dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk korban ktp/a.

Realisasi Program dan kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan pelaksanaan pelayanan kasus disesuaikan dengan kebutuhan yang tercatat dan dilaporkan; Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tercatat dan terlayani sebanyak 38 kasus yang terinput didalam Aplikasi SIFONI PPA. Kasus tersebut ditangani oleh 6 (enam) lembaga layanan kasus yang tersedia.

Faktor pendukung sub kegiatan ini yaitu :

- komitmen, relasi, dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat membantu agar kebijakan dapat terlaksana dengan harapan yang diinginkan serta lebih membuat korban merasa cepat di respon jika mereka meminta perlindungan.

- kesadaran dari masyarakat dan korban kekerasan yang berani melaporkan jika mereka menjadi korban kekerasan. Adanya sosialisasi dan berbagai program yang diberikan kepada masyarakat membuat masyarakat makin sadar akan pentingnya melapor tindak kekerasan.

Faktor Penghambat antara lain adalah :

- Belum tersedianya UPTD PPA sebagai Unit Pelaksana utama dalam pelayanan kasus PPA.
- Belum tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas dalam pelayanan psikososial.
- Dana yang tersedia belum tentu dapat digunakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja mengingat setiap kasus memiliki kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan Peraturan Menteri PPA No. 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik PPA Tahun 2021.
- Perlunya peningkatan kapasitas Lembaga dalam upaya penjangkauan kasus.

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

Untuk pencapaian indikator program pengelolaan sistem data gender dan anak pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25

Pencapaian Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	25	33,33	133,33	

Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) tahun 2021 sebesar 33,33% lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 25%. OPD yang melaksanakan pendataan SIGA yaitu baru sebanyak 10 dari 30 OPD. Capaian indikator tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Kabupaten Belitung melalui koordinasi permintaan data sesuai dengan aplikasi SIGA ke seluruh OPD, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Belitung untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan menyajikan data dengan penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Belitung. Faktor penghambat, kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP, sehingga diperlukan Bimtek atau pelatihan-pelatihan khusus mengenai Pemenuhan Sistem Informasi Gender dan Anak.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut : Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebesar 25%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah sebesar Rp. 44.142.340,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.491.420,- setara dengan 78,14% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 44.142.340,- dan realisasi sebesar Rp. 34.491.420,- atau setara dengan 78,14%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data gender dan anak. *Outcome* kegiatan adalah data terpilah dan informasi gender yang akurat.

Capaian indicator tersebut didukung melalui koordinasi permintaan data sesuai dengan aplikasi SIGA ke seluruh OPD, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Belitung untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan menyajikan data dengan penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Belitung. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.142.340,- dan realisasi sebesar Rp. 34.491.420,- atau setara dengan 78,14%. *Output* sub kegiatan adalah data terpilah dan informasi gender dan anak.

Realisasi kegiatan ini dibawah 80% dikarenakan 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk POKJA Rp. 3.469.070 tidak direalisasikan keseluruhan disebabkan ada aturan PPKM; 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 6.176.900 untuk Luar Daerah tidak direalisasikan keseluruhan karena pembatasan keberangkatan akibat pandemi Covid-19.

Capaian indicator tersebut didukung melalui koordinasi permintaan data sesuai dengan aplikasi SIGA ke seluruh OPD, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Belitung untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan menyajikan data dengan penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Belitung. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Tujuan/Sasaran strategis 3

Tujuan 3 : Terpenuhinya Hak Anak

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hidup anak

Tujuan Strategis 3 **Terpenuhinya hak anak** Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya kualitas hidup anak** dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Kabupaten Layak Anak (KLA)**, yang targetnya pada tahun 2021 adalah Pratama 80% di Kabupaten Belitung
2. **Prevalensi kekerasan terhadap anak**, pada tahun 2021 ditargetkan 4,8 di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 3 dan sasaran 3, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 56,40% dan termasuk kategori Baik (terdapat indikator negatif).

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Tujuan: Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	Pratama (80%)	Pratama (58,73%)	75,09
2	Sasaran: Prevalensi kekerasan terhadap anak		4,8	1,81	37,71% (Indikator Negatif)
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					56,40%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 3 **Terpenuhinya hak anak** dan Sasaran Strategis 3 **Meningkatnya kualitas hidup anak** adalah sebesar 56,40%. Untuk capaian indikator Kabupaten Layak anak tahun 2021 dilaksanakan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan memperoleh predikat Pratama.

Dan untuk Indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak capaian indikatornya 1,81 menurun dibandingkan tahun sebelumnya 2,84. Ini merupakan indikator negatif dimana memang diharapkan capaian kurang dari target. Namun demikian harus terus ditingkatkan lagi di tahun 2022 agar target kinerja dari indikator-indikator tersebut pada tahun 2022 bisa terus masuk dalam kriteria Sangat Tinggi.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
 dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2019	2020		
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	60,9	72,96	12,06	
2	Persentase kekerasan terhadap anak	%	2,84	1,81	1,03	Indikator negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28
Pencapaian Tujuan/ Sasaran
KLA dan Prevalensi Kekerasan terhadap anak

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	60,9	80	58,37	72,96	85	68,67
2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	2,84	4,8	1,81	37,71	4,40	41,14

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1). Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kebijakan KLA sudah dimulai sejak tahun 2006. Sementara, pada Tahun 2019, Kabupaten Belitung meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat pratama dengan skor perolehan Penilaian Mandiri sebesar 609.93.

Pengembangan KLA di setiap Kabupaten/Kota harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak, yakni

- (1) hak sipil dan kebebasan;
- (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- (5) Perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu Predikat Pratama. Faktor pendorong KLA antara lain adalah

meningkatkan sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA.

Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Solusi kedepan antara lain adalah :

1. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif menyuarakan aspirasi anak.
2. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak.
3. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif
4. Pemerintah perlu membuat data khusus untuk mengintegrasikan data anak.
- 5 pemerintah perlu mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan

Dalam mengatasi masalah yang menjadi faktor penghambat antara lain adalah:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
- b. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya berbagai fasilitas yang ramah dan layak bagi anak
- c. Penguatan komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan
- d. Memperbaiki kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.
- e. Meningkatkan kapasitas anggaran desa demi mewujudkan desa kelurahan layak anak.

2). Prevalensi kekerasan terhadap anak

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu dihitung dari Jumlah anak yang memerlukan perlindungan dibagi dengan jumlah anak dikali 1.000.

Pencapaian dari indikator ini adalah rasio dari 10 anak yang memerlukan perlindungan khusus dibagi 55.293 jumlah anak dikali 10.000 didapat hasil 21,81 dibawah target capaian 4,8 dan tentunya hal ini menjadi harapan kita bersama akan sedikitnya kasus kekerasan terhadap perempuan (Indikator negatif).

Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap anak didapat dari rumusan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk tahun 2021 dengan nilai sebesar 1,81 dengan korban kekerasan anak berjumlah 10 orang, sama dengan tahun 2020 berjumlah 10 orang.

Jumlah anak korban kekerasan sama tahun lalu. Hal ini menjadi catatan bahwa upaya untuk pencegahan anak menjadi korban kekerasan menjadi perlu untuk terus ditindaklanjuti. Selain itu indikator pravelensi perlindungan anak seperti anak dengan masalah hukum, anak disabilitas, anak dengan HIV/AIDS dan lain-lain juga menjadi perhatian. Layanan terhadap anak-anak dengan perlindungan terus dilakukan dan upaya-upaya terhadap pencegahan juga terus dilakukan.

Faktor pendukung daripada layanan penanganan kasus antara lain adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tugas dan fungsi dari lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Meskipun begitu permasalahan pada ranah domestik juga sering mendapat hambatan karena masyarakat cenderung sering menutupi karena merasa bahwa permasalahan ini adalah aib.

Hambatan yang dialami antara lain adalah kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan penanganan kasus, koordinasi yang belum kuat antara lembaga layanan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tersedianya UPTD PPA sebagai pemangku pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak.

Adapun capaian Tujuan/Sasaran 3 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator Program Pemenuhan Hak Anak adalah Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama.

Indikator ini diperoleh dengan melihat skor penilaian KLA. Dimana untuk tahun 2021 dilaksanakan penilaian mandiri dan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan memperoleh nilai status KLA Pratama.

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 72,96%

Untuk pencapaian indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Pencapaian Indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	80	58,37	72,96	

Pada perolehan penilaian KLA tersebut ada beberapa poin penting yang belum dilaksanakan untuk memenuhi indikator pemenuhan hak anak ini, yaitu :

1. Belum tersedia kebijakan terkait dengan Informasi Layak Anak.
2. Belum terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
3. Masih tingginya angka pernikahan anak.
4. Belum tersedia SDM di Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang telah mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak.
5. Belum tersedia Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi dan merata di seluruh desa dan kelurahan.

6. Belum banyak terbentuk kerjasama dari Dunia Usaha dan Media untuk melakukan promosi dan kampanye tentang Pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7. Belum banyak tersedia fasilitas untuk anak disabilitas.
8. Belum kuatnya implementasi dari Kawasan Tanpa rokok.
9. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang sesuai dengan standar.
10. Belum tersedianya Rumah Ibadah ramah Anak
11. Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor terkait dengan perlindungan anak.

Strategi yang dilakukan

1. Memperkuat peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
2. Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
3. Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungan secara terus menerus kepada masyarakat.

Capaian indikator kinerja Program Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut : Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama. Alokasi anggaran Program Pemenuhan Hak Anak adalah sebesar Rp. 128.231.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.376.100,- setara dengan 61,12% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.093.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.508.925,- atau setara dengan 17,97%. *Output* kegiatan adalah tercapainya peningkatan status kla. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan terhadap anak.

Faktor pendorong kegiatan ini antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA.

Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.093.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.508.925,- atau setara dengan 17,97%. *Output* sub kegiatan adalah terkondinasinya gugul tugas KLA.

Kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% dikarenakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan KLA tidak dilaksanakan karena tidak ada panggilan Rakor KLA dari Kementerian PPPA R.I, dan Belanja Makanan Minuman Kegiatan KLA tidak dilaksanakan karena tidak ada verifikasi Lapangan dari Tim Juri Independent yang dilaksanakan dari Kementerian PPPA R.I hanya salah satu offline atau Online.

Faktor pendukung yaitu Koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait KLA baik; komitmen dari Pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA.

faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

(2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.138.550,- dan realisasi sebesar Rp. 73.867.175,- atau setara dengan 71,62%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya forum anak kabupaten belitung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan terhadap anak.

Faktor pendorong kegiatan antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait

dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA.

Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.032.700,- dan realisasi sebesar Rp. 68.095.925,- atau setara dengan 78,24%. *Output* sub kegiatan adalah terfasilitasinya forum anak.

Realisasi Sub Kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Belanja Sewa Gedung yang terinput di SIPD tercantum Rp.6.000.000/hari sedangkan untuk realisasi belanja sewa gedung yang dilapangan sebesar Rp. 2.500.000/hari. Faktor pendukung yaitu Koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait KLA baik; komitmen dari Pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA.

faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.516.850,- dan realisasi sebesar Rp. 5.771.250,- atau setara dengan 54,88%. *Output* sub kegiatan adalah terfasilitasinya forum anak.

Realisasi Sub Kegiatan ini dibawah 80% dikarenakan Belanja SPPD dinas luar daerah tidak direalisasikan dikarenakan PPKM.

Faktor pendukung yaitu Koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait KLA

baik; komitmen dari Pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA.

faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

c. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.589.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0,00%. *Output* sub kegiatan adalah terkondinasinya gugus tugas KLA.

Realisasi Sub Kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan terdapat satu paket sub kegiatan seharusnya dihapus/ dibatalkan, tetapi pada SIPD muncul kembali sebesar Rp. 5.589.000,-.

Faktor pendukung yaitu Koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait KLA baik; komitmen dari Pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA.

faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

2. Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator Program Perlindungan Khusus Anak adalah persentase penanganan anak korban kekerasan

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 100%

Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan Khusus Anak pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30

**Pencapaian Indikator Program Perlindungan Khusus Anak
Tahun 2021**

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan anak korban kekerasan	100	100	100	

Indikator persentase penanganan anak korban kekerasan didapat dari rumusan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk tahun 2021 dengan nilai sebesar 1,81 dengan korban kekerasan anak berjumlah 10 orang, sama dengan tahun 2020 berjumlah 10 orang.

Jumlah anak korban kekerasan sama tahun lalu. Hal ini menjadi catatan bahwa upaya untuk pencegahan anak menjadi korban kekerasan menjadi perlu untuk terus ditindaklanjuti. Selain itu indikator prevalensi perlindungan anak seperti anak dengan masalah hukum, anak disabilitas, anak dengan HIV/AIDS dan lain-lain juga menjadi perhatian. Layanan terhadap anak-anak dengan perlindungan terus dilakukan dan upaya-upaya terhadap pencegahan juga terus dilakukan.

Faktor pendukung daripada layanan penanganan kasus antara lain adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tugas dan fungsi dari lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Meskipun begitu permasalahan pada ranah domestik juga sering mendapat hambatan karena masyarakat cenderung sering menutupi karena merasa bahwa permasalahan ini adalah aib.

Hambatan yang dialami antara lain adalah kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan penanganan kasus, koordinasi yang belum kuat antara lembaga layanan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tersedianya UPTD PPA sebagai pemangku pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan khusus anak sebagai berikut : Persentase penanganan anak korban kekerasan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Perlindungan Khusus Anak adalah sebesar Rp. 65.783.525,-

dengan realisasi sebesar Rp. 57.140.125,- setara dengan 86,86% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.783.525,- dan realisasi sebesar Rp. 57.140.125,- atau setara dengan 86,86%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yg tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Factor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.239.425,- dan realisasi sebesar Rp. 51.379.275,- atau setara dengan 88,22%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah peserta bimtek.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yg tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Factor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.544.100,- dan realisasi sebesar Rp. 5.760.850,- atau setara dengan 76,36%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah peserta bimtek dan terbinanya PATBM di Desa/ Kel.

Realisasi sub kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rp.1.685.750 kegiatan untuk di Lapangan sebagian direalisasikan hanya untuk Tim Pembina Kelompok PATBM, sedangkan untuk pembinaan di desa tidak direalisasikan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yg tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Factor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

Program Penunjang yang mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah dengan target 100%
- Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan target 75%
- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah dengan target 100%.

Untuk pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
**Pencapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah
 Daerah Kabupaten/ Kota
 Tahun 2021**

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75	77,33	103,11	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah tahun 2021 sebesar 100 persen. Indikator ini merupakan program rutin sekretariat. Yang mencakup tersedianya dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan maupun dokumen keuangan lainnya.
- Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah tahun 2021 sebesar 77,33% lebih besar dari target 75%. Indeks ASN ini diperoleh dari perhitungan oleh BKPSDM daerah yang bekerja sama dengan OPD.
- Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tahun 2021 sebesar 100%. Merupakan program rutin sekretariat yang berupa administrasi dan pelayanan umum kantor.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya

sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.377.236.288,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.308.730.111,- setara dengan 98,73% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.839.200,- dan realisasi sebesar Rp. 5.820.200,- atau setara dengan 99,67%. *Output* kegiatan adalah Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.994.000,- atau setara dengan 99,80%. *Output* sub kegiatan adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.839.200,- dan realisasi sebesar Rp. 2.826.200,- atau setara dengan 99,54%. *Output* sub kegiatan adalah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.578.045.088,- dan realisasi sebesar Rp. 4.574.863.849,- atau setara dengan 99,93%. *Output* kegiatan adalah dokumen keuangan perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.575.065.888,- dan realisasi sebesar Rp. 4.571.888.849,- atau setara dengan 99,93%. *Output* sub kegiatan adalah gaji dan tunjangan ASN.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.979.200,- dan realisasi sebesar Rp. 2.975.000,- atau setara dengan 99,86%. *Output* sub kegiatan adalah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 246.961.853,- atau setara dengan 84,14%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah *Outcome* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.920.000,- atau setara dengan 99,11%. *Output* sub kegiatan adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.227.500,- dan realisasi sebesar Rp. 87.522.800,- atau setara dengan 99,20%. *Output* sub kegiatan adalah peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 13.967.800,- atau setara dengan 99,77%. *Output* sub kegiatan adalah peralatan rumah tangga.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.374.500,- dan realisasi sebesar Rp. 81.806.250,- atau setara dengan 78,38%. *Output* sub kegiatan adalah bahan logistik kantor. Realisasi Anggaran kurang dari 80% dimana Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 22.225.750,- tidak direalisasikan, disesuaikan dengan kebutuhan.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.398.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.383.800,- atau setara dengan 99,95%. *Output* sub kegiatan adalah barang cetak dan penggandaan.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.420.000,- atau setara dengan 98,22%. *Output* sub kegiatan adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.941.203,- atau setara dengan 48,76%. *Output* sub kegiatan adalah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Realisasi sub kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah banyak dilaksanakan dengan zoom meeting, mengingat masih dalam pandemic Covid-19.

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 213.908.409,- atau setara dengan 97,43%. *Output* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.

Outcome kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.140.400,- atau setara dengan 72,56%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah materai jumlah barang/surat yang di kirim. Realisasi kurang dari 80% dimana, hanya direalisasikan sesuai dengan pengiriman surat dan jasa surat yang lain menggunakan media elektronik.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.768.009,- atau setara dengan 90,64%. *Output* sub kegiatan adalah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 165.000.000,- atau setara dengan 100,00%. *Output* sub kegiatan adalah tenaga non pns sopir, tenaga non pns cleaning service, tenaga non pns penjaga malam.

(5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.302.000,- dan realisasi sebesar Rp. 267.175.800,- atau setara dengan 95,32%. *Output* kegiatan adalah barang milik daerah dalam kondisi baik. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.750.000,- dan

realisasi sebesar Rp. 114.812.800,- atau setara dengan 90,58%. *Output* sub kegiatan adalah kendaraan perorangan dinas/operasional roda 4 yang di pelihara.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.420.000,- dan realisasi sebesar Rp. 26.393.000,- atau setara dengan 96,25%. *Output* sub kegiatan adalah peralatan mesin lainnya yang di pelihara.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.132.000,- dan realisasi sebesar Rp. 125.970.000,- atau setara dengan 99,87%. *Output* sub kegiatan adalah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp. 8.732.151.038,- dan perubahannya sebesar Rp. 8.545.324.388,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.727.029.736,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,42%. Komposisi belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung untuk tahun 2021, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32

**Komposisi Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2020 - 2021**

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp) 2020	Realisasi Belanja (Rp) 2020	2020 %	Anggaran Belanja(Rp) 2021	Realisasi Belanja(Rp) 2021	2021 %
1	Belanja Tidak Langsung	4.463.413.000,-	4.322.884.240,-	96,85	4.575.065. 888	4.571.888. 849	99,31
2	Belanja Langsung	5.054.687.243,-	4.093.568.301,-	80,99	3.970.258. 500	3.155.140. 887	79,47
Jumlah		9.518.100.243,-	8.416.452.541,-	88,43	8.545.324. 388	7.727.029. 736	90,42

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran tahun 2021.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dandidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tersaji pada ikhtisar laporan capai target kinerja keuangan APBD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.33

**Capaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun
Anggaran 2021**

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.133.719.188	5.377.236.288	5.308.730.111	98,73
Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.839.200	5.839.200	5.820.200	99,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	2.994.000	99,80
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.839.200	2.839.200	2.826.200	99,54
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.233.832.088	4.578.045.088	4.574.863.849	99,93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.230.852.888	4.575.065.888	4.571.888.849	99,93
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.979.200	2.979.200	2.975.000	99,86
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.195.900	293.500.000	246.961.853	84,14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	9.000.000	8.920.000	99,11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.246.900	88.227.500	87.522.800	99,20
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	14.000.000	13.967.800	99,77
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.051.000	104.374.500	81.806.250	78,38
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.398.000	28.398.000	28.383.800	99,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -	4.500.000	4.500.000	4.420.000	98,22

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5
	undangan				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000.000	45.000.000	21.941.203	48,76
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		219.550.000	219.550.000	213.908.409	97,43
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.950.000	2.950.000	2.140.000	72,56
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	51.600.000	46.768.009	90,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	165.000.000	165.000.000	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		263.302.000	280.302.000	267.175.800	95,32
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.750.000	126.750.000	114.812.800	90,58
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.420.000	27.420.000	26.393.000	96,25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.132.000	126.132.000	125.970.000	99,87
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		575.220.985	487.712.385	307.212.400	62,99
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		575.220.985	487.712.385	307.212.400	62,99
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	219.690.475	158.929.475	139.931.410	88,05

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	103.104.800	236.570.350	99.997.550	42,27
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	163.483.100	24.574.200	9.693.250	39,44
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	88.942.610	67.638.600	57.590.190	85,14
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		789.007.350	644.553.400	578.843.599	89,81
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	526.988.950	464.772.500	439.143.710	94,49
	Penyediaan Permakanan	210.666.800	210.666.800	203.930.330	96,80
	Penyediaan Alat Bantu	54.992.500	54.992.500	54.655.000	99,39
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	132.000.000	132.000.000	126.500.000	95,83
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	129.329.650	67.113.200	54.058.380	80,55
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	262.018.400	179.113.200	139.699.889	77,71

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5
	Penyediaan Permakanan	7.012.500	5.775.900	2.722.500	47,14
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	255.005.900	174.005.900	136.977.389	78,72
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		408.296.850	408.210.800	402.431.275	98,58
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		408.296.850	408.210.800	402.431.275	98,58
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.296.850	408.210.800	402.431.275	98,58
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		589.324.860	589.319.860	537.086.356	91,14
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		589.324.860	589.319.860	537.086.356	91,14
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	589.324.860	589.319.860	537.086.356	91,14
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		4.891.600	4.891.600	2.064.500	42,21
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		4.891.600	4.891.600	2.064.500	42,21
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.891.600	4.891.600	2.064.500	42,21
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		338.965.440	284.039.940	243.508.900	85,73
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		338.965.440	284.039.940	243.508.900	85,73

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	338.965.440	284.039.940	243.508.900	85,73
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		476.573.400	511.202.709	177.144.950	34,65
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-	52.230.000	51.775.350	99,13
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-	52.230.000	51.775.350	99,13
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	476.573.400	458.972.700	125.369.600	27,32
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	476.573/400	82.827.700	78.458.600	94,73
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	376.145.000	46.911.000	12,47
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		44.142.340	44.142.340	34.491.420	78,14
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan	44.142.340	44.142.340	34.491.420	78,14

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.142.340	44.142.340	34.491.420	78,14
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	302.953.100	128.231.550	78.376.100	61,12
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.093.000	25.093.000	4.508.925	17,97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.093.000	25.093.000	4.508.925	17,97
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	277.860.100	103.138.550	73.867.175	71,62
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	228.751.800	87.032.700	68.095.925	78,24
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.516.850	10.516.850	5.771.250	54,88
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.591.450	5.589.000	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS	69.055.925	65.783.525	57.140.125	86,86

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
ANAK				
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.055.925	65.783.525	57.140.125	86,86
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.511.825	58.239.425	51.379.275	88,22
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.544.100	7.544.100	5.760.850	76,36

Adanya pandemi Corona Virus Disease 2021 (COVID 19) sangat mempengaruhi kurang optimalnya pencapaian kinerja keuangan yang hanya 90,42%. Penyebaran COVID 19 membatasi kegiatan, sosialisasi dan pergerakan di lapangan sehingga kegiatan-kegiatan di lapangan yang melibatkan banyak peserta atau perjalanan dinas luar daerah sementara ditiadakan.

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 8.545.324.388,- dengan 11 Program, 18 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.727.029.736,- dan Persentase terhadap total Anggaran 90,42%.

Terkait pagu dan realisasi anggaran dengan pencapaian target tujuan/sasaran

strategis dan indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2021 lebih rinci dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.34
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2020 dan 2021

No	Tujuan/Sasaran Strategis	2020				2021			
		Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	2.706.863.940	2.151.175.676	79,47	2	2.134.688.045	1.827.638.130	85,62
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	3	635.816.500	417.830.265	65,72	2	839.384.980	455.145.270	54,22
3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	161.925.000	124.409.800	76,83	2	194.015.075	135.516.225	69,85
Jumlah		7	3.504.605.440	2.693.415.741	76,85	6	3.168.088.100	2.418.299.625	76,33

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.35
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran Dinas Sosial,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
 Tahun 2021**

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	940,06	1.827.638.130	85,62
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	2	96,41	455.145.270	54,22
3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	56,40	135.516.225	69,85
	Jumlah	6	346,29	2.418.299.625	76,33

3.5 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan/sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 1 (satu) dari 3 (tiga) tujuan/sasaran menunjukkan pencapaian >100% dan 2 (dua) tujuan/sasaran lainnya dengan pencapaian <100%.

Tabel 3.36

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS	2	940,06	85,62	854,44
	Sasaran: Meningkatnya penanganan PMKS				
	Total	2	940,06	85,62	854,44

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pencapaian **Tujuan:** Meningkatnya kesejahteraan PMKS dan **Sasaran:** Meningkatnya penanganan PMKS adalah sebesar 854,44%.

Tujuan/Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN UMUM

Dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 walaupun belum tercapai namun dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata capaian dari 6 (enam) Indikator Kinerja adalah 346,29%. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021 diselenggarakan secara sinergi melalui Program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Program Penanganan Bencana
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 7) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 8) Program Perlindungan Perempuan
- 9) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 10) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 11) Program Perlindungan Khusus Anak.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran yang ditetapkan.



Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Segala kekurangan dalam pelaksanaan program dapat menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Dengan demikian diharapkan nantinya terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

2. LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sepanjang Tahun 2021, agar lebih meningkat ditahun selanjutnya adalah :

- 1) Mengusulkan Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2022,
- 2) Memverifikasi dan Verifali data PMKS secara berkala,
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek,
- 4) Menguatkan peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
- 5) Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
- 6) Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungna secara terus menerus kepada masyarakat.

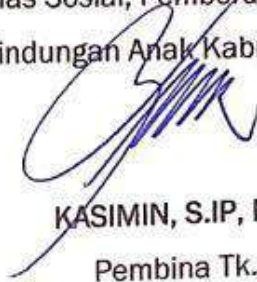
Laporan Kinerja sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan diharapkan bisa memberi masukan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja ini benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disusun dan disampaikan atas perhatian terima kasih.

Tanjungpandan, Maret 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung,



KASIMIN, S.IP, MAB

Pembina Tk. I

NIP. 196908241990031004

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA 2021
2. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2021
4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PPK) TAHUN 2021
5. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2021







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. NURMAN SUNANDA, S.E, MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SAHANI SALEH, S.Sos
Jabatan : BUPATI BELITUNG

Selaku atasan Pihak Kesatu, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 17 Februari 2021

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,



H. SAHANI SALEH, S.Sos

Pihak Kesatu,
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak



H. NURMAN SUNANDA, S.E, MM

NIP. 19650805 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS pertahun	0,5
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,80
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,11
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,5
5	Terpenahinya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	80,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,8

Program		Anggaran	Keterangan
1	Pemberdayaan Sosial	Rp. 575.220.985	APBD
2	Rehabilitasi Sosial	Rp. 789.007.350	APBD
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 408.296.850	APBD
4	Penanganan Bencana	Rp. 589.324.860	APBD
5	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 4.891.600	APBD
6	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 338.965.440	APBD
7	Perlindungan Perempuan	Rp. 476.573.400	APBD
8	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 44.142.340	APBD
9	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 302.953.100	APBD
10	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 69.055.925	APBD
11	Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.133.719.188	APBD
JUMLAH		Rp. 8.732.151.038	


BUPATI BELITUNG,
H. SAHANT SALEH, S.Sos

Tanjungpandan, 17 Februari 2021
KEPALA DINAS

H. NURMAN SUNANDA, S.E., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP.196508051994031006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. NURMAN SUNANDA, S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

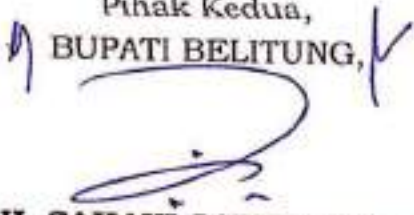
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 25 Oktober 2021

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,


H. SAHANI SALEH, S.Sos

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,

H. NURMAN SUNANDA, S.E., M.M.
Pemuda Utama Muda
NIP. 196508051994031006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS pertahun	0,5
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,80
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,11
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,5
5	Terpenuhinya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	80,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,8

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 487.712.385	PAPBD
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 487.712.385	PAPBD
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 644.553.400	PAPBD
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 464.772.500	PAPBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 179.780.900	PAPBD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 408.210.800	PAPBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 408.210.800	PAPBD
D.	Penanganan Bencana	Rp. 589.319.860	PAPBD
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 589.319.860	PAPBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 4.891.600	PAPBD
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 4.891.600	PAPBD
F.	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 284.039.940	PAPBD
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 284.039.940	PAPBD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. 511.202.700	PAPBD
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 52.230.000	DAK
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 458.972.700	PAPBD & DAK

	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	44.142.340	✓	PAPBD
	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	44.142.340		PAPBD
I.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	128.231.550	✓	PAPBD
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	25.093.000		PAPBD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	103.138.550		PAPBD
J.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	65.783.525	✓	PAPBD
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	65.783.525		PAPBD
K.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.377.236.288	✓	PAPBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	5.839.200		PAPBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.578.045.088		PAPBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	293.500.000		PAPBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	219.550.000		PAPBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	280.302.000		PAPBD
JUMLAH		Rp.	8.545.324.388	✓	

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

Tanjungpandan, 25 Oktober 2021



NURMAN SUNANDA, S.E, MM

Pembina Utama Muda
NIP.196508051994031006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, Desember 2021



KASIMIN, S.IP, MAB

Pembina Tk. I

NIP. 196908241990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS ✓	Persentase penurunan PMKS pertahun ✓	0,5
2	Meningkatnya Penanganan PMKS ✓	Persentase (%) PMKS yang tertangani ✓	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan ✓	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ✓	45.11
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan ✓	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan ✓	5,5
5	Terpembinya Hak Anak ✓	KLA (Kabupaten Layak Anak) ✓	80,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak ✓	Prevalensi kekerasan terhadap anak ✓	4,8

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 487.712.385	PAPBD
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 487.712.385	PAPBD
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 644.553.400	PAPBD
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 464.772.500	PAPBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 179.780.900	PAPBD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 408.210.800	PAPBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 408.210.800	PAPBD
D.	Penanganan Bencana	Rp. 589.319.860	PAPBD
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesupsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 589.319.860	PAPBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 4.891.600	PAPBD
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 4.891.600	PAPBD
F.	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 284.039.940	PAPBD
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 284.039.940	PAPBD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. 511.202.700	PAPBD
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 52.230.000	DAK
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 458.972.700	PAPBD & DAK

	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	44.142.340	PAPBD
	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	44.142.340	PAPBD
I.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	128.231.550	PAPBD
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	25.093.000	PAPBD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	103.138.550	PAPBD
J.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	65.783.525	PAPBD
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	65.783.525	PAPBD
K.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.377.236.288	PAPBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	5.839.200	PAPBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.578.045.088	PAPBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	293.500.000	PAPBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	219.550.000	PAPBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	280.302.000	PAPBD
JUMLAH		Rp.	8.545.324.388	



M. SALEM SALEH, S.Sos

Tanjungpandan, Desember 2021
KEPALA DINAS



KASIMIN, S.IP, MAB

Pembina Tk. I

NIP. 196908241990031004

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1																		
1																		
1	06																	
1	06	01																
1	06	01	2.01															
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		5 dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						3,300,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen pelaporan perangkat daerah promosi pembangunan daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		3 dokumen 1 kali		38,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						41,000,000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,466,413,000							4,912,713,000
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		4,463,413,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						4,909,413,000
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen keuangan perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene		2 dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						3,300,000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						21,000,000							23,100,000
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene		36 Stel		21,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						23,100,000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						415,300,300							456,855,000
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %		7,140,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						7,900,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %		72,704,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						79,975,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		peralatan kebersihan dan bahan pembersih		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %		11,221,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,500,000	
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan logistik kantor		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %		86,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			94,840,000	
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		barang cetak & penggandaan		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %		23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,740,000	
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		bahan bacaan		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %		4,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,900,000	
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			231,000,000	
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								83,400,000				91,740,000	
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang		5 Jenis 5 Jenis		83,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,740,000	
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								219,860,000				236,920,000	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa surat menyurat		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		3,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,100,000	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %		51,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,100,000	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kesejahteraan Non PNS		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang		100 %		165,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			181,720,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								267,837,000	Umum			294,841,000	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene		100 %		111,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			122,100,000	
1 06 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Mebeleur dalam kondisi baik		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene		100 %		3,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,333,000	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Perengkapan gedung kantor dalam kondisi baik		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajene		100 % 100 %		27,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,443,000	
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor dalam kondisi baik		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %		126,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			138,965,000	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								1,019,980,300				1,121,980,000	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								1,019,980,300				1,121,980,000	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendamping BPNT terfasilitasi Jumlah pendamping PKH terfasilitasi Jumlah tenaga kesejahteraan sosial		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		6 Orang 22 Orang 54 Orang		392,732,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			432,007,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Penghargaan kepada veteran/ pejuang		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		26 Orang		230,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			254,001,000	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		1 Lembaga		269,342,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			296,277,000	
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan		1 Lembaga		126,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			139,695,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan									
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,578,722,025					1,800,499,000
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								1,202,572,075					1,386,733,000
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan		panti yang diberikan bantuan permakanan pemberian permakanan pada lanjut usia pemberian permakanan pada penyandang disabilitas		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 panti 80 orang 30 orang		355,038,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				455,000,000
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu		alat bantu bagi penyandang disabilitas		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 orang		55,050,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60,000,000
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Pelayanan reunifikasi keluarga lanjut usia terlantar Pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan		80 Orang 48 Orang		132,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				145,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan									
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kepada lanjut usia Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitong, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		100 Orang 100 Orang 100 %	660,483,825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					726,533,000
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							376,149,950						413,766,000
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan		Pemberian permakanan pada orang terlantar		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitong, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		18 Orang	8,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9,378,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Pemberian perbekalan kesehatan untuk orang terlanjar		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		6 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,600,000	
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Fakir miskin yang diberikan bantuan UEP		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		25 KPM		90,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,165,000	
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Pelayanan penelusuran keluarga orang terlanjar		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan		18 Orang		271,474,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			298,623,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan									
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								497,930,000					547,723,000
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								497,930,000					547,723,000
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		1 Dokumen		497,930,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				547,723,000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								600,931,640					661,025,000
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								600,931,640					661,025,000
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Pembinaan TAGANA dan relawan KSB		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		600,931,640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				661,025,000
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								29,130,000					32,043,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									29,130,000			32,043,000	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		1 TMP			29,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32,043,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									1,092,271,000			1,201,501,999	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									414,553,000			456,009,000	
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									414,553,000			456,009,000	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kelembagaan PUG (Lembaga)		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		1 Lembaga			414,553,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		456,009,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								191,755,000				210,931,999	
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								191,755,000				210,931,999	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lembaga		191,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210,931,999	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								44,144,000				48,559,000	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								44,144,000				48,559,000	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Data terpilah dan informasi gender dan anak		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		44,144,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			48,559,000	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								322,434,000				354,678,000	
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								33,600,000				36,960,000	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Terkoordinasinya gugus tugas KLA		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		650 Point		33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36,960,000	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								288,834,000				317,718,000	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya forum anak		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		1 Organisasi		232,069,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			255,276,000	
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas		Terfasilitasinya forum anak		Kab. Belitung, Tanjung		1 Organisasi		10,550,000	Dana Transfer Umum-			11,605,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum				
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terkoordinasinya gugus tugas KLA		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		650 Point		46,215,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			50,837,000	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								119,385,000				131,324,000	
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								119,385,000				131,324,000	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Jumlah peserta bimtek		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Orang		104,440,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			114,884,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta bimtek		Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Orang		14,945,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,440,000	
TOTAL									10,333,775,265				11,425,240,999	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														7,500,460,833	7,466,847,583	10,223,739,000					
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														5,133,719,188	5,332,073,488	6,060,469,000				
1	06	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														5,839,200	5,839,200	44,300,000			
1	06	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Terpenuhiya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang			100 %	5 dokumen	5 dokumen			100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	3,300,000
1	06	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Promosi pembangunan daerah	Terpenuhiya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang			100 %	3 dokumen 1 kali	3 dokumen 1 kali			100 %	2,839,200	2,839,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	41,000,000
1	06	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														4,233,832,088	4,578,045,088	4,912,713,000		
1	06	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan infomrasi kinerja perangkat daerah	Gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhiya dokumen keuangan sesuai peraturan	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	1 tahun	14 Bulan			100 %	4,230,852,888	4,575,065,888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan infomrasi kinerja perangkat daerah	100 %	4,909,413,000
1	06	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan infomrasi kinerja perangkat daerah	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Terpenuhiya dokumen keuangan sesuai peraturan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang			100 %	2 dokumen	2 Dokumen			100 %	2,979,200	2,979,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan infomrasi kinerja perangkat daerah	100 %	3,300,000
1	06	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														0	0	23,100,000		
1	06	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	PDH	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang			75 %	36 Stel	0 Stel			75 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 %	23,100,000
1	06	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														411,195,900	265,337,200	456,855,000		
1	06	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Belitung, Tanjung Pandan,			100 %	100 %	100 %			100 %	7,000,000	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,900,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Bangunan Kantor	perangkat daerah		perangkat daerah	Lesung Batang								Alokasi Umum		perangkat daerah			
1 06 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %	100 %	100 %			70,246,900	70,246,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	79,975,000
1 06 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Peralatan rumah tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %	100 %	100 %			10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	12,500,000
1 06 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Bahan logistik kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %	100 %	100 %			86,051,000	86,051,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	94,840,000
1 06 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Barang cetak & penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %	100 %	100 %			23,398,000	23,398,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	25,740,000
1 06 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %	100 %	100 %			4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	4,900,000
1 06 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	100 %	100 %			210,000,000	64,141,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	231,000,000
1 06 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	0			91,740,000
1 06 01 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Peralatan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang		100 %	5 Jenis 5 Jenis	0 Jenis 0 Jenis			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	91,740,000
1 06 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													219,550,000	219,550,000			236,920,000
1 06 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah barang/surat yang dikirim Jumlah materai	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	100 %	6 Kali 170 Lembar			2,950,000	2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	3,100,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 06 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %	100 %	12 Bulan		100 %	51,600,000	51,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	52,100,000
1 06 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Tenaga Non PNS Cleaning Service Tenaga Non PNS penjaga malam Tenaga Non PNS Sopir	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalag		100 %	100 %	3 Orang 1 Orang 1 Orang		100 %	165,000,000	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	181,720,000
1 06 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											263,302,000	263,302,000					294,841,000
1 06 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kendaraan perorangan dinas/ operasional roda 2/3 yang dipeliharaha Kendaraan perorangan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalag		100 %	100 %	12 Unit 5 Unit		100 %	109,750,000	109,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	122,100,000
1 06 01 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Mebeleur yang dipelihara	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalag		100 %	100 %	0 Unit		100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	3,333,000
1 06 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalag		100 %	100 %	41 Unit		100 %	27,420,000	27,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	30,443,000
1 06 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Gedung kantor dan bangunan lain dalam kondisi baik	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		100 %	100 %	100 %		100 %	126,132,000	126,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	138,965,000
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											575,220,985	487,712,385					1,121,980,000
1 06 02 2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											575,220,985	487,712,385					1,121,980,000
1 06 02 2.0 3 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Berkembang	Jumlah pendamping BPNT terfasilitasi Jumlah pendamping PKH terfasilitasi	Keakuratan data	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan		90 % 0 % 90 %	6 Orang 22 Orang 54 Orang	6 Orang 22 Orang 54 Orang		100 %	219,690,475	158,929,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	90 % 0 % 90 %	432,007,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
	Kabupaten/Kota	Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial		Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan									Berkembang	Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif			
1 06 02 2.0 3 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Berkembang Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	Penghargaan kepada veteran/pejuang	Keakuratan data	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		90 % 0 % 90 %	26 Orang	22 Orang	100 %	103,104,800	236,570,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Berkembang	Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	90 % 0 % 90 %	254,001,000
1 06 02 2.0 3 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Berkembang Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah karang taruna yang dibina	Keakuratan data	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan		90 % 0 % 90 %	1 Lembaga	6 Lembaga	100 %	163,483,100	24,574,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Berkembang	Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan	90 % 0 % 90 %	296,277,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Sosial (PSKS) aktif			Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan										Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif			
1 06 02 2.0 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Berkembang Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	Laporan LK3	Keakuratan data	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		90 % 0 % 90 %	1 Lembaga	1 Dokumen		100 %	88,942,610	67,638,360	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Berkembang Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	90 % 0 % 90 %	139,695,000
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											789,007,350	644,553,400		1,800,499,000			
1 06 04 2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											526,988,950	464,772,500		1,386,733,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	panti yang diberikan bantuan permakanan pemberian permakanan pada lanjut usia pemberian permakanan pada penyandang disabilitas	Terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 panti 80 orang 30 orang	4 panti 80 orang 30 orang		100 %	210,666,800	210,666,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	455,000,000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Alat bantu bagi penyandang disabilitas	Terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	18 orang	6 orang		100 %	54,992,500	54,992,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	60,000,000
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pelayanan reunifikasi keluarga lanjut usia terlantar Pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas	Terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan		100 %	80 Orang 48 Orang	20 Orang 15 Orang		100 %	132,000,000	132,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	145,200,000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Persentase penyandang disabilitas	Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sosial	Kab. Belitung, Tanjung		100 %	100 Orang 100 Orang	10 Orang 0 Orang		100 %	129,329,650	67,113,200	Dana Transfer Umum-		Persentase penyandang disabilitas	100 %	726,533,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah	Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Spiritual, dan Sosial	terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	kepada anak terlantar Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kepada lanjut usia Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas	dasar di luar panti	Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan			100 %	6 Orang					Dana Alokasi Umum		terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
1 06 04 2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										262,018,400	179,780,900			413,766,000			
1 06 04 2.0 2 03	Penyediaan Perumahan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pemberian permakanan pada orang terlantar	Teepenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan			100 %	18 Orang	18 Orang	100 %	7,012,500	5,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	9,378,000
1 06 04 2.0 2 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan	Terlayannya kebutuhan kesehatan PMKS lainnya di luar panti	Teepenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan			100 %	6 Orang	0 Orang	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar,	100 %	6,600,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan									gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
1 06 04 2.0 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Fakir miskin yang diberikan bantuan UEP	Teepenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan	100 %	25 KPM	0 KPM		100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	99,165,000		
1 06 04 2.0 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terlaksananya penelusuran keluarga PMKS di luar panti	Teepenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang	100 %		100 %	255,005,900	174,005,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	100 %	298,623,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan															
1 06 05	2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										408,296,850	408,296,850							547,723,000
1 06 05	2.0 2 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial;	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu yang akurat	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	408,296,850	408,296,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial;	100 %			547,723,000	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											589,324,860	589,319,860							661,025,000
1 06 06	2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										589,324,860	589,319,860							661,025,000
1 06 06	2.0 2 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah bencana kabupaten	Laporan pembinaan TAGANA dan Relawan KSB (Kampung Siaga Bencana)	Terlayannya korban bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	589,324,860	589,319,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	100 %			661,025,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																		
1 06 07 2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		32,043,000
1 06 07 2.0 1 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan	90 %	1 TMP	1 TMP		100 %	4,891,600	4,891,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	90 %		32,043,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										1,231,690,205	1,109,170,505							1,610,570,000
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										338,965,440	284,039,940							456,009,000
2 08 02 2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										338,965,440	284,039,940							456,009,000
2 08 02 2.0 3 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Kelembagaan PUG (Lembaga) Terlaksananya program kerja organisasi perempuan	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung,	53 %	1 Lembaga	1 Lembaga 1 Organisasi		100 %	338,965,440	284,039,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53 %		456,009,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah	Sebelum	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																		620,000,000
2 08 03 2.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		0
2 08 03 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus	Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan														
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Terlaksananya webinar perlindungan perempuan dan anak																
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Terlaksana rapat koordinasi lintas sektor																
			Tersedianya materi KIE																
2 08 03 2.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		620,000,000
2 08 03 2.0 2 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah lembaga Operasional pendampingan pelayanan KtPA/TPPO	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
2 08 03 2.0 2 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Terfasilitasinya pelaksanaan visum dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk korban KtP/A	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan														
			Terlaksananya pendampingan dan penjangkauan korban KtP/A																
			Terlaksananya pendampingan oleh tenaga ahli terhadap korban KtP/A																

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan													48,559,000		
2 08 05	2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														48,559,000				
2 08 05	2.0 1 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Data terpilah dan informasi gender dan anak	Data terpilah dan informasi gender yang akurat	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 %	1 Dokumen	1 Dokumen		80 %	44,142,340	44,142,340	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	25 %	48,559,000	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																	354,678,000		
2 08 06	2.0 1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														36,960,000				
2 08 06	2.0 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Terkoordinasinya gugus tugas KLA	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pratama	Pratama	650 Point	650 Point	100 %	25,093,000	25,093,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Pratama	Pratama	36,960,000
2 08 06	2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														317,718,000				
2 08 06	2.0 2 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Terfasilitasinya forum anak	Meningkatnya layanan terhadap anak	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau,		Pratama	Pratama	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	228,751,800	137,300,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Pratama	Pratama	255,276,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.08.06.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Terfasilitasinya forum anak	Meningkatnya layanan terhadap anak	Semua Kelurahan Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan	Pratama	Pratama	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	10,516,850	10,516,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Pratama	Pratama	11,605,000	
2.08.06.2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Terkoordinasinya gugus tugas KLA	Meningkatnya layanan terhadap anak	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Membalong, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Badau, Semua Kelurahan	Pratama	Pratama	650 Point	650 Point	100 %	38,591,450	31,091,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Pratama	Pratama	50,837,000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										69,055,925	65,783,525					131,324,000	
2.08.07.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										69,055,925	65,783,525					131,324,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 08 07 2.0 3 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan anak korban kekerasan	Jumlah peserta bimtek	Meningkatnya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	25 Orang	50 Orang	100 %	61,511,825	58,239,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan anak korban kekerasan	100 %	114,884,000	
2 08 07 2.0 3 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan anak korban kekerasan	Jumlah peserta bimtek Terbinanya PATBM di Desa/ Kel	Meningkatnya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	25 Orang	50 Orang 10 Desa/Kel	100 %	7,544,100	7,544,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan anak korban kekerasan	100 %	16,440,000	
TOTAL											8,732,151,038	8,576,018,088					11,834,309,000	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KABUPATEN BELITUNG

01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Sebelum Perubahan (PMDN 90/2019)			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 650/2020)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 650/2020)	Sebelum Perubahan (KEPMEN 650/2020)			Sumber Dana	Cairan Penting	Setelah Perubahan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Refocusing 2)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan setelah pembaharuan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sebelum pembaharuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)	(17)
1.06.01.01	Urusan : Bidang Urusan : Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah		100 %		1.06.01.01	Urusan : Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah		100 %	5.514.810.300	APBD		100 %	4.987.666.488	5.486.984.628	5.578.230.728	
1.06.01.2.01	1. Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen pelaporan perangkat daerah Promosi pembangunan daerah Hasil :				1.06.01.2.01	1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Hasil :			41.000.000	APBD		8 Dok	5.839.200	5.839.200	7.500.000	
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Rencana dan Renja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanjungpandan	3 Dokumen	3.000.000	1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanjungpandan	5 Dokumen	3.000.000	APBD		5 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.900.000	
1.06.01.2.01.03	2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah	Tanjungpandan	3 Dokumen	3.000.000	1.06.01.2.01.03	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah	Tanjungpandan	3 Dokumen	3.000.000	APBD		3 Dokumen	2.839.200	2.839.200	3.600.000	
1.06.01.2.01.03	3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali	35.000.000	1.06.01.2.01.03		Keluaran : Promosi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali	35.000.000	APBD		0 Kali	0	0	0	
1.06.01.2.02	2. Kegiatan : Administrasi Keuangan	Keluaran : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil :				1.06.01.2.02	2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil :			4.466.413.000	APBD		3 Dokumen	4.233.832.088	4.578.045.088	4.578.935.088	
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Tanjungpandan		4.463.413.000	1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Tanjungpandan	1 Tahun	4.463.413.000	APBD		14 Bulan	4.230.852.888	4.575.065.888	4.575.065.888	
1.06.01.2.02.04	2. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah	Tanjungpandan	4 Dokumen	3.000.000	1.06.01.2.02.04	2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah	Tanjungpandan	4 Dokumen	3.000.000	APBD		2 Dokumen	2.979.200	2.979.200	3.800.200	
1.06.01.2.03	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Pegawai		100 % 100 % 100 %		1.06.01.2.03	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Pegawai		100 % 100 % 100 %				75 %				
1.06.01.2.03.01	3. Kegiatan : Administrasi Umum	Keluaran : Jasa surat menyurat Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa kebersihan kantor Alat tulis kantor Barang cetak dan penggandaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Perlengkapan kebersihan dan bahan pembersih Bahan bacaan Makanan dan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perlengkapan gedung kantor Peralatan gedung kantor Cedung kantor dalam kondisi baik Kejelasan pegawai non PNS Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Keselamatan pegawai non PNS Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Mebekur dalam kondisi baik Hasil :				1.06.01.2.03.01	3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran :			21.000.000	APBD		0 Orang	0	0	27.000.000	
1.06.01.2.03.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat		100 %	3.000.000	1.06.01.2.03.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Pakain Dinas Berserut Angkur Kelengkapannya	Keluaran : Pakain dinas berserut perlengkapannya	Tanjungpandan	36 Stel	21.000.000	APBD		0 Stel	0	0	27.000.000	
1.06.01.2.03.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa listrik, komunikasi, sumber daya air		100 %	51.600.000	1.06.01.2.03.02	4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bahan Logistik Kantor Barang cetak dan penggandaan Bahan bacaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil :			415.300.300	APBD		100 %	265.337.200	313.247.740	315.515.240	
1.06.01.2.03.08	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : Non PNS petugas kebersihan		100 %	99.200.000	1.06.01.2.03.08	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tanjungpandan	100 %	7.140.700	APBD		100 %	7.000.000	9.100.000	9.100.000	
1.06.01.2.03.10	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor		100 %	45.904.500	1.06.01.2.03.10	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjungpandan	100 %	72.704.500	APBD		100 %	70.246.500	88.264.440	88.264.440	
1.06.01.2.03.11	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetak dan penggandaan		100 %	40.400.000	1.06.01.2.03.11	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Peralatan rumah tangga	Tanjungpandan	100 %	11.221.100	APBD		100 %	10.000.000	14.469.500	14.469.500	
1.06.01.2.03.12	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		100 %	7.140.700	1.06.01.2.03.12	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Bahan Logistik Kantor	Tanjungpandan	100 %	86.238.000	APBD		100 %	86.051.000	104.374.500	105.642.000	
1.06.01.2.03.14	7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		100 %	11.221.100	1.06.01.2.03.14	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetak dan penggandaan	Tanjungpandan	100 %	23.400.000	APBD		100 %	23.398.000	28.398.000	29.398.000	

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Sebelum Perubahan (PMDN 90/2019)			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Sebelum Perubahan (KEPMEN 050/2020)			Sumber Dana	Catatan Penting	Setelah Perubahan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Refocking 2)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sebelum pembahasan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan setelah pembahasan)
1.06.01.2.03.15	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan	100 %	4.596.000	1.06.01.2.03.06	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan	Tanjungpandan	100 %	4.596.000	APBD	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
1.06.01.2.03.17	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	100 %	32.286.000	1.06.01.2.03.09	7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tanjungpandan	100 %	210.000.000	APBD	Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	64.141.300	64.141.300	64.141.300		
1.06.01.2.03.23	12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	3 Jenis	48.000.000	1.06.01.2.03.04	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemangaj Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jasa surat menyurat Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kesejahteraan Non PNS	Tanjungpandan	219.960.000	APBD	Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	219.550.000	219.550.000	219.550.000		
1.06.01.2.03.28	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dengan kondisi baik Non PNS penjaga kantor	100 % 1 Orang	126.332.000 33.000.000	1.06.01.2.03.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	Tanjungpandan	100 %	3.060.000	APBD	Keluaran : Jumlah materai Jumlah barang / surat yang dikirim	170 Lembar 10 Kali	2.950.000	2.950.000	2.950.000		
1.06.01.2.03.30	14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/ operasional dengan baik Non PNS Sopir	100 % 1 Orang	164.952.000 33.000.000	1.06.01.2.03.01	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tanjungpandan	100 %	51.600.000	APBD	Keluaran : Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	51.600.000	51.600.000	51.600.000		
1.06.01.2.03.32	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	10.000.000	1.06.01.2.03.04	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Kesejahteraan Non PNS	Tanjungpandan	100 %	165.200.000	APBD	Keluaran : Tenaga Non PNS Sopir Tenaga Non PNS Cleaning Service Tenaga Non PNS Penjaga Malam	1 Orang 3 Orang 1 Orang	165.000.000	165.000.000	165.000.000		
1.06.01.2.03.38	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	210.000.000	1.06.01.2.03.07	6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Peralatan gedung kantor Perengkapan gedung kantor	Tanjungpandan	83.400.000	APBD	Keluaran : Jenis barang milik daerah	0 Jenis	0	0	59.338.400		
1.06.01.2.03.22	11. Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perengkapan gedung kantor	3 Jenis	45.200.000	1.06.01.2.03.06	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Peralatan gedung kantor Perengkapan gedung kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 5 Jenis	83.400.000	APBD	Keluaran : Peralatan gedung kantor Perengkapan gedung kantor	0 Jenis 0 Jenis	0	0	59.338.400		
1.06.01.2.03.34	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	17.675.000	1.06.01.2.03.07	7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik Mebeleur dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Perengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	267.857.000	APBD	Keluaran : Barang milik daerah dalam kondisi baik	4 Jenis	263.302.000	270.302.000	270.302.000		
1.06.01.2.03.35	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik	100 %	3.030.000	1.06.01.2.03.02	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	111.000.000	APBD	Keluaran : Kendaraan perorangan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara Kendaraan perorangan dinas/ kendaraan roda 2/3 yang dipelihara	5 Unit 12 Unit	109.750.000	126.750.000	126.750.000		
1.06.01.2.03.4	4. Kegiatan : Peningkatan Diagnis dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Pakain dinas beserta perlengkapannya Hasil :	1.06.01.2.03.05	2. Pemeliharaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	3.030.000	APBD	Keluaran : Mebeleur yang dipelihara	0 Unit	0	0	0		
1.06.01.2.03.02	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Penyediaan pakain dinas beserta perlengkapannya	26 Set	21.000.000	1.06.01.2.03.06	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Perengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	27.675.000	APBD	Keluaran : Peralatan mesin lainnya yang dipelihara	41 Unit	27.420.000	27.420.000	27.420.000		
1.06.01.2.03.09	4. Kegiatan : Peningkatan Diagnis dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Pakain dinas beserta perlengkapannya Hasil :	1.06.01.2.03.09	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	126.132.000	APBD	Keluaran : Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 Unit	126.132.000	216.132.000	216.132.000		
1.06.02	1. Program : Pemberdayaan Sosial	1.06.02	1. Program : Pemberdayaan Sosial	1.019.990.300	490.727.985	637.733.188	606.118.410		
1.06.02.2.03	1. Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03	1. Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.019.990.300	APBD	490.727.985	637.733.188	606.118.410		
1.06.02.2.03.01	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	39.210.000 113.650.000 239.872.800	APBD	158.929.475	158.929.475	158.929.475		
1.06.02.2.03.03	Sub Kegiatan 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.03	Sub Kegiatan 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	230.910.000	APBD	79.372.800	247.366.000	183.513.225		
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Sebelum Perubahan (PMDN 90/2019)			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)			Sumber Dana	Catatan Penting	Setelah Perubahan					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Refocking 2)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sebelum pembahasan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan setelah pembahasan)	
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Keluaran : Pembedayaan kelengkapan kesejahteraan sosial	1 Lembaga	269.342.500	1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Keluaran : Pembedayaan kelengkapan kesejahteraan sosial	Kabupaten Belung	1 Lembaga	269.342.500	APBD	Keluaran : Jumlah karang taruna yang dibentuk	6 Lembaga	163.483.100	151.823.100	171.733.100
1.06.02.2.03.05	Sub Kegiatan	4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran : Pembedayaan kelengkapan kesejahteraan sosial	1 Lembaga	126.995.000	1.06.02.2.03.05	Sub Kegiatan	4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran : Pembedayaan kelengkapan kesejahteraan sosial	Kabupaten Belung	1 Lembaga	126.995.000	APBD	Keluaran : Laporan LK3	1 Dokumen	88.942.610	79.014.010	91.942.610
1.06.04	2. Program	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlarut, Anak terlarut, Lansia Terlarut, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Persentase Penduduk Miskin Desil 1, 2, dan 3 Persentase Kelompok Usaha Bersama Usaha Ekonomi Produktif (UEPn) Fakir Miskin Berkembang Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Aktif	100 %		1.06.04	2. Program	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlarut, Anak terlarut, Lansia Terlarut, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Persentase Penduduk Miskin Desil 1, 2, dan 3 Persentase Kelompok Usaha Bersama Usaha Ekonomi Produktif (UEPn) Fakir Miskin Berkembang Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Aktif	100 %		1.578.722.025		100 %		644.553.400	644.553.400	644.553.400
1.06.04.2.01	1. Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) lansia yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti Persentase (%) disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti Jumlah panti yang diberikan bantuan makanan Persentase (%) anak terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti Hasil :	100 %		1.06.04.2.01	1. Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) lansia yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti Persentase (%) disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti Jumlah panti yang diberikan bantuan makanan Persentase (%) anak terlarut yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti Hasil :	100 %		1.202.972.075	APBD	Keluaran : Jumlah disabilitas terlarut, anak terlarut, lansia terlarut, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	120 Orang	464.772.500	464.772.500	464.772.500
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Pemakanan	Keluaran : Pemberian pemakanan pada lanjut usia Pemberian pemakanan kepada penyandang disabilitas Jumlah panti yang diberikan bantuan makanan	80 Orang 30 Orang 4 Panti	191.785.250 108.000.000 55.253.000	1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Pemakanan	Keluaran : Pemberian pemakanan pada lanjut usia Pemberian pemakanan kepada penyandang disabilitas Panti yang diberikan bantuan pemakanan	Kabupaten Belung	80 Orang 30 Orang 4 Panti	191.785.250 108.000.000 55.253.000	APBD	Keluaran : Pemberian pemakanan pada lanjut usia Pemberian pemakanan kepada penyandang disabilitas Panti yang diberikan bantuan pemakanan	80 Orang 30 Orang 4 Panti	210.666.800	210.666.800	210.666.800
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan	2. Penyediaan Alat Bantu	Keluaran : Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas	18 Orang	55.050.000	1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan	2. Penyediaan Alat Bantu	Keluaran : Alat bantu bagi penyandang disabilitas	Kabupaten Belung	18 Orang	55.050.000	APBD	Keluaran : Alat bantu bagi penyandang disabilitas	6 Orang	54.992.500	54.992.500	54.992.500
1.06.04.2.01.04	Sub Kegiatan	3. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	Keluaran : Pelayanan reunifikasi keluarga lanjut usia terlarut Pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas	80 Orang 48 Orang	66.000.000 66.000.000	1.06.04.2.01.04	Sub Kegiatan	3. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	Keluaran : Pelayanan reunifikasi keluarga lanjut usia terlarut Pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas	Kabupaten Belung	80 Orang 48 Orang	66.000.000 66.000.000	APBD	Keluaran : Pelayanan reunifikasi keluarga lanjut usia terlarut Pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas	20 Orang 15 Orang	132.000.000	132.000.000	132.000.000
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan	4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran : Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada lanjut usia Persentase anak terlarut di luar panti Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas	100 Orang 100 % 100 Orang	332.514.750 78.279.075 249.690.000	1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan	4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran : Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada lanjut usia Persentase anak terlarut di luar panti Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas	Kabupaten Belung	100 Orang 100 % 100 Orang	332.514.750 78.279.075 249.690.000	APBD	Keluaran : Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada lanjut usia Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada anak terlarut Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas	0 Orang 10 Orang 6 Orang	67.113.200 24.000.000 43.113.200	67.113.200	67.113.200
1.06.04.2.02	2. Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Nipah di Luar Panti Sosial	Keluaran : Penyelesaian penanganan dan pemulangan anak terlarut Pelayanan anak terlarut di luar panti Hasil :	100 %		1.06.04.2.02	2. Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Nipah di Luar Panti Sosial	Keluaran : Penyelesaian penanganan dan pemulangan anak terlarut Pelayanan anak terlarut di luar panti Hasil :	100 %		376.149.950	APBD	Keluaran : Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan rehabilitasi sosial	100 %	179.780.900	179.780.900	179.780.900
1.06.04.2.02.01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Pemakanan	Keluaran : Pemberian pemakanan pada orang terlarut	18 Orang	8.525.000	1.06.04.2.02.01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Pemakanan	Keluaran : Pemberian pemakanan pada orang terlarut	Kabupaten Belung	18 Orang	8.525.000	APBD	Keluaran : Jumlah pemakanan bagi PMKS lainnya	18 Orang	5.775.000	5.775.000	5.775.000
1.06.04.2.02.06	Sub Kegiatan	2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran : Pemberian perbekalan kesehatan untuk orang terlarut	6 Orang	6.000.000	1.06.04.2.02.06	Sub Kegiatan	2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran : Pemberian perbekalan kesehatan untuk orang terlarut	Kabupaten Belung	6 Orang	6.000.000	APBD	Keluaran : Terlayannya kebutuhan kesehatan PMKS lainnya di luar panti	0 %	0	0	0
1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan	4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran : Fakir miskin yang diberikan bantuan UEP	25 KPM	90.150.000	1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan	4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran : Fakir miskin yang diberikan bantuan UEP	Kabupaten Belung	25 KPM	90.150.000	APBD	Keluaran : Fakir miskin yang diberikan bantuan UEP	0 KPM	0	0	0
1.06.04.2.02.11	Sub Kegiatan	5. Pemberian Pelayanan Penchusutan Keluarga	Keluaran : Pelayanan penchusutan keluarga orang terlarut	18 Orang	271.474.950	1.06.04.2.02.11	Sub Kegiatan	5. Pemberian Pelayanan Penchusutan Keluarga	Keluaran : Pelayanan penchusutan keluarga orang terlarut	Kabupaten Belung	18 Orang	271.474.950	APBD	Keluaran : Terlaksananya penchusutan keluarga PMKS lainnya di luar panti	100 %	174.005.900	174.005.900	174.005.900
1.06.05	3. Program	Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 %		1.06.05	3. Program	Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 %		497.930.000		Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	408.296.850	408.210.800	471.358.450
1.06.05.2.02	1. Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat Hasil :	100 %		1.06.05.2.02	1. Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat Hasil :	100 %		497.930.000	APBD	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi Hasil : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	100 %	408.296.850	408.210.800	471.358.450
1.06.05.2.02.02	Sub Kegiatan	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat Hasil :	1 Dok	497.930.000	1.06.05.2.02.02	Sub Kegiatan	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat Hasil :	100 %		497.930.000	APBD	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	1 Dokumen	408.296.850	408.210.800	471.358.450
1.06.06	4. Program	Penanganan Bencana		100 %		1.06.06	4. Program	Penanganan Bencana		100 %		600.931.640		1. Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100 %	589.319.860	589.319.860	589.319.860
1.06.06.2.02	1. Kegiatan	Penyenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota	Keluaran : Pembinaan TAGANA dan KSB Hasil :	100 %		1.06.06.2.02	1. Kegiatan	Penyenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota	Keluaran : Pembinaan TAGANA dan KSB Hasil :	100 %		600.931.640	APBD	Keluaran : Korban bencana yang menerima bantuan sosial	100 %	589.319.860	589.319.860	589.319.860
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran : Pembinaan TAGANA dan KSB Hasil :	100 %		1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran : Pembinaan TAGANA dan KSB Hasil :	100 %		600.931.640	APBD	Keluaran : Laporan pembinaan TAGANA dan Relawan KSB (Kampung Siaga Bencana)	1 Dok	589.319.860	589.319.860	589.319.860

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Sebelum Perubahan (PMDN 90/2019)			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Sebelum Perubahan (KEPMEN 050/2020)			Sumber Dana	Catatan Penting	Setelah Perubahan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sebelum pembahasan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan setelah pembahasan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan setelah pembahasan)
1.06.07	4. Program : Pengabdian Taman Makam Pahlawan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif		90 %		1.06.07	4. Program : Pengabdian Taman Makam Pahlawan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif		90 %	29.130.000			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	90,00 %	4.891.600	4.891.600	98.250.000
1.06.07.2.01	3. Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran : Penghargaan kepada veteran/ pejuang Hasil :				1.06.07.2.01	3. Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran : Penghargaan kepada veteran/ pejuang Hasil :		100 %	29.130.000	APBD		Keluaran : Terlaksananya pengabdian Taman Makam Pahlawan Hasil : Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100 %	4.891.600	4.891.600	98.250.000
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran : Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik Hasil :		1 TMP	29.130.000	1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran : Taman makam pahlawan dalam kondisi baik Hasil :	Kabupaten Belitung	1 TMP	29.130.000	APBD		Keluaran : Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik Hasil :	1 TMP	4.891.600	4.891.600	98.250.000
1.06.07.2.01.03	Kegiatan Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terlaksananya program kerja organisasi perempuan																
1.06.07.2.01.03.01	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terlaksananya program kerja organisasi perempuan		1 Organisasi	246.873.000													
2.08	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2			2.08	Urusan : Pemberintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.08.02	Bidang Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2			2.08.02	Bidang Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.08.02.01	1. Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		53 %		2.08.02.01	1. Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		53 %	414.553.000			Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53 %	284.039.940	284.039.940	284.039.940
2.08.02.01.01	1. Kegiatan : Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terlaksananya program kerja organisasi perempuan Hasil :				2.08.02.01.01	1. Kegiatan : Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Kembangkan PUG Hasil :		1 Lembaga	414.553.000	APBD		Keluaran : Kembangkan PUG Hasil : Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan	1 Lembaga	284.039.940	284.039.940	284.039.940
2.08.02.01.01.01	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Kembangkan PUG Hasil :		1 Lembaga	167.680.000	2.08.02.01.01.01	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terlaksananya program kerja organisasi perempuan Kembangkan PUG Hasil :	Kabupaten Belitung	1 Organisasi 1 Lembaga	246.873.000 167.680.000	APBD		Keluaran : Terlaksananya program kerja organisasi perempuan Kembangkan PUG Hasil :	1 Organisasi 1 Lembaga	284.039.940	284.039.940	284.039.940
2.08.03	2. Program : Perlindungan Perempuan	Persentase Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		5,5 %		2.08.03	2. Program : Perlindungan Perempuan	Persentase Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		5,5 %	191.755.000			Rasio Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,5 %	511.202.700	511.202.700	511.202.700
2.08.03.2.01	1. Kegiatan : Pencegahan Kekeerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Keluaran : Jumlah lembaga Hasil :				2.08.03.2.01	1. Kegiatan : Pencegahan Kekeerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Keluaran : Jumlah lembaga Hasil :			0			Keluaran : Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak Hasil : Persentase penanganan kasus	100 % 100 %	52.230.000	52.230.000	52.230.000
2.08.03.2.01.01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekeerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran :				2.08.03.2.01.01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekeerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran :			0	DAK Non Fisik		Keluaran : Terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak Terlaksananya webinar perlindungan perempuan dan anak Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Tersedianya materi KIE	1 Kali 4 Kali 2 Kali 1 Materi	52.230.000	52.230.000	52.230.000
2.08.03.2.01.02	1. Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekeerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah lembaga Hasil :				2.08.03.2.01.02	2. Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekeerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah lembaga Hasil :			191.755.000	APBD		Keluaran : Jumlah lembaga yang terfasilitasi Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	3 Lembaga 100 %	458.972.700	458.972.700	458.972.700
2.08.03.2.01.02.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekeerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah lembaga Hasil :		3 Lembaga	191.755.000	2.08.03.2.01.02.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekeerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah lembaga Hasil :	Kabupaten Belitung	3 Lembaga	191.755.000	APBD		Keluaran : Jumlah lembaga Operasional pendampingan pelayanan KIP/TPPO	4 Lembaga 100 %	82.827.700	82.827.700	82.827.700
2.08.03.2.01.02.02	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekeerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran :				2.08.03.2.01.02.02	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekeerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran :			0	DAK Non Fisik		Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan visum dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk korban KIP/TPPO Terlaksananya pendampingan dan penjangkauan korban KIP/TPPO Terlaksananya pendampingan oleh tenaga ahli terhadap korban KIP/TPPO	100 % 100 % 100 %	376.145.000	376.145.000	376.145.000
2.08.05	3. Program : Pengabdian Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah		53 %		2.08.05	3. Program : Pengabdian Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah		53 %	44.144.000			Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	25 %	44.142.340	44.142.340	44.144.000
2.08.05.2.01	1. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kembangkan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Data terlah dan informasi gender dan anak Hasil :				2.08.05.2.01	1. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kembangkan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Data terlah dan informasi gender dan anak Hasil :			44.144.000	APBD		Keluaran : Tersedianya data gender dan anak Hasil : Data terlah dan informasi gender yang akurat	1 Dokumen 80 %	44.142.340	44.142.340	44.144.000
2.08.05.2.01.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Data terlah dan informasi gender dan anak Hasil :		1 Dokumen	44.144.000	2.08.05.2.01.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Data terlah dan informasi gender dan anak Hasil :	Kabupaten Belitung	1 Dokumen	44.144.000	APBD		Keluaran : Data terlah dan informasi gender dan anak Hasil :	1 Dokumen	44.142.340	44.142.340	44.144.000
2.08.06	4. Program : Program Pemenuhan Hak Anak (PIA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama		Pratama		2.08.06	4. Program : Program Pemenuhan Hak Anak (PIA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama		Pratama	322.434.000			Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Pratama	204.002.000	204.002.000	204.002.000
2.08.06.2.01	1. Kegiatan : Pembinaan PIA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Hasil :				2.08.06.2.01	1. Kegiatan : Pembinaan PIA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Hasil :			53.600.000	APBD		Keluaran : Tercapainya peningkatan status KLA Hasil : Meningkatnya perlindungan terhadap anak	650 Poin 100 %	25.093.000	25.093.000	25.093.000
2.08.06.2.01.02	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Hasil :		650 Poin	53.600.000	2.08.06.2.01.02	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Hasil :	Kabupaten Belitung	650 Poin	53.600.000	APBD		Keluaran : Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Hasil :	650 Poin	25.093.000	25.093.000	25.093.000
2.08.06.2.01.02.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Forum Anak Hasil :		1 Organisasi	252.069.000	2.08.06.2.01.02.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Forum Anak Hasil :	Kabupaten Belitung	1 Organisasi	252.069.000	APBD		Keluaran : Terfasilitasinya Forum Anak Hasil :	1 Organisasi	178.909.000	178.909.000	178.909.000
2.08.06.2.01.02.02	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Forum Anak Hasil :		1 Organisasi	10.550.000	2.08.06.2.01.02.02	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Forum Anak Hasil :	Kabupaten Belitung	1 Organisasi	10.550.000	APBD		Keluaran : Terfasilitasinya Forum Anak Hasil :	1 Organisasi	10.516.850	10.516.850	10.516.850
2.08.06.2.01.02.03	Sub Kegiatan 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Hasil :		650 Poin	46.215.000	2.08.06.2.01.02.03	Sub Kegiatan 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Hasil :	Kabupaten Belitung	650 Poin	46.215.000	APBD		Keluaran : Terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Hasil :	650 Poin	31.091.450	31.091.450	31.091.450
2.08.07	5. Program : Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemangangan Anak Korban Kekeerasan		100 %		2.08.07	5. Program : Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemangangan Anak Korban Kekeerasan		100 %	119.385.000			Persentase Pemangangan Anak Korban Kekeerasan	100 %	65.783.525	65.783.525	65.783.525
2.08.07.2.01	1. Kegiatan : Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Keluaran : Jumlah peserta bimtek Hasil :				2.08.07.2.01	1. Kegiatan : Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Keluaran : Jumlah peserta bimtek Hasil :			119.385.000	APBD		Keluaran : Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa Kelurahan	100 %	65.783.525	65.783.525	65.783.525

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Sebelum Perubahan (PMDN 90/2019)			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Sebelum Perubahan (KEPMEN 050/2020)			Sumber Dana	Catatan Penting	Setelah Perubahan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Refocusing 2)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sebelum Pembahasan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan setelah Pembahasan)
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hasil :			Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hasil :			Hasil : Meningkatkan layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	100 %				
2.08.07.2.03.02	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemngkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelida Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah peserta bimtek		25 Orang	104.440.000	2.08.07.2.03.02	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemngkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelida Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah peserta bimtek	Kabupaten Belitung	25 Orang	104.440.000	APBD	Keluaran : Jumlah peserta bimtek	50 Orang	58.239.425	58.239.425	58.239.425	
2.08.07.2.03.03	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyelida Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah peserta bimtek		25 Orang	14.945.000	2.08.07.2.03.03	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyelida Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah peserta bimtek	Kabupaten Belitung	25 Orang	14.945.000	APBD	Keluaran : Jumlah peserta bimtek Terbitnya PATBM di Desa Kel	50 Orang 10 Desa/Kel	7.544.100	7.544.100	7.544.100	
					10.333.775.265						10.333.775.265				8.234.820.688	8.880.863.378	9.097.063.013	

Tanjungpandan, 23 Juli 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

H. NURMAN SUNANDA, S.E., M.M.
NIP. 196508051994031006

- Kolom**
- Keterangan**
- (1) Di isi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (diseuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
 - (2) Di isi uraian nama urusan pemerintahan daerah, nama bidang urusan pemerintahan daerah, uraian judul program, kegiatan dan sub kegiatan (sesuai pemetaan Renja Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
 - (3) Di isi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan (sesuai pemetaan Renja Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
 - (4) Di isi lokasi dari sub kegiatan untuk tahun 2021 induk
 - (5) Di isi target capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021 induk (sesuai pemetaan Renja Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
 - (6) Di isi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021 induk
 - (7) Di isi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (diseuaikan dengan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)
 - (8) Di isi uraian nama urusan pemerintahan daerah, nama bidang urusan pemerintahan daerah, uraian judul program, kegiatan dan sub kegiatan (diseuaikan dengan hasil pemetaan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan DPPA hasil refocusing terakhir Tahun 2021 yang tidak ada dalam Renja Induk Tahun 2021)
 - (9) Di isi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan (diseuaikan dengan hasil pemetaan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)
 - (10) Di isi lokasi dari sub kegiatan untuk tahun 2021 induk
 - (11) Di isi target capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021 induk (diseuaikan dengan hasil pemetaan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)
 - (12) Di isi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021 induk (diseuaikan dengan hasil pemetaan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)
 - (13) Di isi sumber dana
 - (14) Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu
 - (15) Di isi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan tahun 2021
 - (16) Di isi target kinerja capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan tahun 2021
 - (17) Di isi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan tahun 2021

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Sebelum Perubahan (PMDN 90/2019)			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Sebelum Perubahan (KEPMEN 050/2020)			Sumber Dana	Catatan Penting	Setelah Perubahan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Refocusing 2)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sedang Pembahasan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sebelum pembahasan)

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Sebelum Perubahan (PMDN 90/2019)			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Sebelum Perubahan (KEPMEN 050/2020)			Sumber Dana	Catatan Penting	Setelah Perubahan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Refocusing 2)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sedang Pembahasan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sebelum pembahasan)

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (PMDN 90/2019)	Sebelum Perubahan (PMDN 90/2019)			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (KEPMEN 050/2020)	Sebelum Perubahan (KEPMEN 050/2020)			Sumber Dana	Catatan Penting	Setelah Perubahan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Refocusing 2)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sedang Pembahasan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Usulan sebelum pembahasan)

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja
1.1.1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	-8,79	-1758	Kurang
1.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	97,69%	122,11	Sangat Baik
2.1.1	Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,11	53,11	117,73	data 2021 masih sama dengan 2020 (data belum muncul dari BPS)
2.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,5	4,13	75,09	Baik (Indikator Negatif)
3.1.1	Tujuan : Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	80%	58,37%	72,96	Cukup
3.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,8	1,81	37,71	Sangat Baik (Indikator Negatif)

LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA			PROGRAM	KEUANGAN		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		PAGU	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	%	0,5	-8,79	-1758	Program Pemberdayaan Sosial	487.712.385	307.212.400	62,99
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	80	97,69	122,11	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	487.712.385	307.212.400	62,99
							Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	158.929.475	139.931.410	88,05
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	236.570.350	99.997.550	42,27
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	24.574.200	9.693.250	39,44
							Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	67.638.360	57.590.190	85,14

							Program Rehabilitasi Sosial	644.553.400	578.843.599	89,81
							Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	464.772.500	439.143.710	94,49
							Penyediaan Permakanan	210.666.800	203.930.330	
							Penyediaan Alat Bantu	54.992.500	54.655.000	99,39
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	132.000.000	126.500.000	95,83
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	67.113.200	54.058.380	80,55
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	179.780.900	139.699.889	77,71
							Penyediaan Permakanan	5.775.000	2.722.500	47,14
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	174.005.900	136.977.389	78,72
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	408.210.800	402.431.275	98,58
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.210.800	402.431.275	98,58
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.210.800	402.431.275	98,58

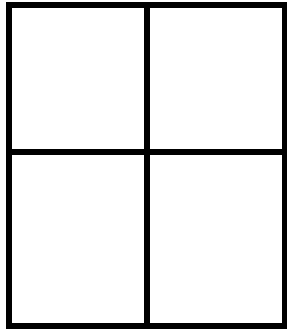
							Program Penanganan Bencana	589.319.860	537.086.356	91,14
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	589.319.860	537.086.356	91,14
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	589.319.860	537.086.356	91,14
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4.891.600	2.064.500	42,21
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.891.600	2.064.500	42,21
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.891.600	2.064.500	42,21
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	284.039.940	243.508.900	85,73
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		45,11	53,11	117,73	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	284.039.940	243.508.900	85,73
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		5,5	4,13 (Indikator negatif)	75,09 (Indikator Negatif)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	284.039.940	243.508.900	85,73

							Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	511.202.700	177.144.950	34,65
							Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	52.230.000	51.775.350	99,13
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	52.230.000	51.775.350	99,13
							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	458.972.700	125.369.600	27,32
							Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.827.700	78.458.600	94,73
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	376.145.000	46.911.000	12,47

							Program Perlindungan Perempuan	44.142.340	34.491.420	78,14
							Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.142.340	34.491.420	78,14
							Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.142.340	34.491.420	78,14
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	128.231.550	78.376.100	61,12
5	Terpenuhinya hak anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)		Pratama (80%)	Pratama (58,37%)	72,96	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.093.000	4.508.925	17,97
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak		4,8	1,81 (Indikator negatif)	37,71 (Indikator Negatif)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.093.000	4.508.925	17,97
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	103.138.550	73.867.175	71,62
							Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	87.032.700	68.095.925	78,24

7	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Terpenuhinya standar pelayanan	%	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.377.236.288	5.308.730.111	98,73
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.839.200	5.820.200	99,67
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.994.000	99,80
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.839.200	2.826.200	99,54
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.578.045.088	4.574.863.849	99,93
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.575.065.888	4.571.888.849	99,93
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.979.200	2.975.000	99,86
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.500.000	246.961.853	84,14
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	8.920.000	99,11
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.227.500	87.522.800	99,20
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	13.967.800	99,77
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.374.500	81.806.250	78,38
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.398.000	28.383.800	99,95
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.420.000	98,22
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	21.941.203	48,76

							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.550.000	213.908.409	97,43
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.950.000	2.140.400	72,56
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	46.768.009	90,64
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	165.000.000	100,00
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.302.000	267.175.800	95,32
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.750.000	114.812.800	90,58
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.420.000	26.393.000	96,25
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.132.000	125.970.000	99,87
Jumlah								8.545.324.388	7.727.029.736	90,42





LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA			PROGRAM	KEUANGAN		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		PAGU	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	%	0,5	-8,79	-1758	Program Pemberdayaan Sosial	487.712.385	307.212.400	62,99
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	80	97,69	122,11	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	487.712.385	307.212.400	62,99
							Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	158.929.475	139.931.410	88,05
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	236.570.350	99.997.550	42,27
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	24.574.200	9.693.250	39,44
							Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	67.638.360	57.590.190	85,14

							Program Rehabilitasi Sosial	644.553.400	578.843.599	89,81
							Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	464.772.500	439.143.710	94,49
							Penyediaan Permakanan	210.666.800	203.930.330	
							Penyediaan Alat Bantu	54.992.500	54.655.000	99,39
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	132.000.000	126.500.000	95,83
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	67.113.200	54.058.380	80,55
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	179.780.900	139.699.889	77,71
							Penyediaan Permakanan	5.775.000	2.722.500	47,14
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	174.005.900	136.977.389	78,72
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	408.210.800	402.431.275	98,58
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.210.800	402.431.275	98,58
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.210.800	402.431.275	98,58

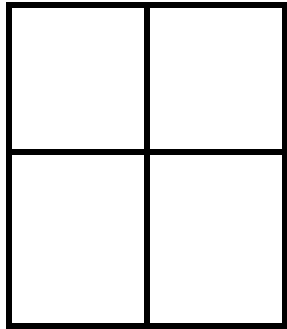
							Program Penanganan Bencana	589.319.860	537.086.356	91,14
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	589.319.860	537.086.356	91,14
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	589.319.860	537.086.356	91,14
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4.891.600	2.064.500	42,21
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.891.600	2.064.500	42,21
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.891.600	2.064.500	42,21
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	284.039.940	243.508.900	85,73
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		45,11	53,11	117,73	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	284.039.940	243.508.900	85,73
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		5,5	4,13 (Indikator negatif)	75,09 (Indikator Negatif)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	284.039.940	243.508.900	85,73

							Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	511.202.700	177.144.950	34,65
							Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	52.230.000	51.775.350	99,13
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	52.230.000	51.775.350	99,13
							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	458.972.700	125.369.600	27,32
							Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.827.700	78.458.600	94,73
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	376.145.000	46.911.000	12,47

							Program Perlindungan Perempuan	44.142.340	34.491.420	78,14
							Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.142.340	34.491.420	78,14
							Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.142.340	34.491.420	78,14
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	128.231.550	78.376.100	61,12
5	Terpenuhinya hak anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)		Pratama (80%)	Pratama (58,37%)	72,96	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.093.000	4.508.925	17,97
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak		4,8	1,81 (Indikator negatif)	37,71 (Indikator Negatif)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.093.000	4.508.925	17,97
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	103.138.550	73.867.175	71,62
							Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	87.032.700	68.095.925	78,24

7	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Terpenuhinya standar pelayanan	%	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.377.236.288	5.308.730.111	98,73
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.839.200	5.820.200	99,67
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.994.000	99,80
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.839.200	2.826.200	99,54
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.578.045.088	4.574.863.849	99,93
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.575.065.888	4.571.888.849	99,93
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.979.200	2.975.000	99,86
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.500.000	246.961.853	84,14
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	8.920.000	99,11
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.227.500	87.522.800	99,20
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	13.967.800	99,77
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.374.500	81.806.250	78,38
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.398.000	28.383.800	99,95
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.420.000	98,22
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	21.941.203	48,76

							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.550.000	213.908.409	97,43
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.950.000	2.140.400	72,56
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	46.768.009	90,64
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	165.000.000	100,00
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.302.000	267.175.800	95,32
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.750.000	114.812.800	90,58
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.420.000	26.393.000	96,25
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.132.000	125.970.000	99,87
Jumlah								8.545.324.388	7.727.029.736	90,42





PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		REALISASI TAHUNAN		PROSENTASE (%)	
			FISIK (%)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEUANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	5.377.236.288	100	5.308.730.111	100	98,73
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dok	5.839.200	8 Dok	5.820.200	100	99,67
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	3.000.000	5 Dok	2.994.000	100	99,80
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dok	2.839.200	3 Dok	2.826.200	100	99,54
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dok	4.578.045.088	3 Dok	4.574.863.849	100	99,93
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tujuan ASN	14 Bulan	4.575.065.888	14 Bulan	4.571.888.849	100	99,93
2.	Sub Kegiatan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2.979.200	2 Dok	2.975.000	100	99,86
c.	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100	293.500.000	100	246.961.853	100	84,14
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komonen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	9.000.000	100	8.920.000	100	99,11
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100	88.227.500	100	87.522.800	100	99,20
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100	14.000.000	100	13.967.800	100	99,77

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	100	104.374.500	100	81.806.250	100	78,38
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang Cetak dan Pengandaan	100	28.398.000	100	28.383.800	100	99,95
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	4.500.000	100	4.420.000	100	98,22
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	45.000.000	100	21.941.203	100	48,76
d.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Adminitrasi Perkantoran	100	219.550.000	100	213.908.409	100	97,43
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Barang / Surat Yang dikirim	170 Lembar 6 kali	2.950.000	166 Lembar 7 kali	2.140.400	97,65	72,56
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	12 Bulan	51.600.000	12 Bulan	46.768.009	100	90,64
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non PNS Sopir, Tenaga Non PNS Cleaning Service, Tenaga Non PNS Penjaga Malam	1 Orang, 3 Orang, 1 Orang	165.000.000	1 Orang, 3 Orang, 1 Orang	165.000.000	100	100,00
e.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	4 Jenis	280.302.000	4 Jenis	267.175.800	100	95,32
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kendaraan perorangan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara, Kendaraan perorangan dinas/kendaraan roda 2/3 yang dipelihara	12 Unit 5 Unit	126.750.000	12 Unit 5 Unit	114.812.800	100	90,58
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin lainnya yang dipelihara	41 Unit	27.420.000	13 Unit	26.393.000	100	96,25
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	100	126.132.000	100	125.970.000	100	99,87

2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	90	487.712.385	98,18	307.212.400	100	62,99
a.	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang aktif	165 PSKS 100	487.712.385	165 PSKS 100	307.212.400	100	62,99
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jumlah pendamping BPNT terfasilitasi, Jumlah pendamping PKH terfasilitasi	54 Orang, 6 Orang, 22 Orang	158.929.475	54 Orang, 6 Orang, 22 Orang	139.931.410	100	88,05
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan Kepada Veteran/Pejuang	22 Orang	236.570.350	20 Orang	99.997.550	90,91	42,27
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah karang taruna yang dibina	6 Lembaga	24.574.200	6 Lembar	9.693.250	100	39,44
4	Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Laporan LK3	1 Dok	67.638.360	1 Dok	57.590.190	100	85,14
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	644.553.400	100	578.843.599	100	89,81

a.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	120 Orang	464.772.500	120 Orang	439.143.710	100	94,49
1	Penyediaan Permakanan	Pemberian Permakanan Pada Lanjut Usia, Pemberian Permakanan Kepada Penyandang disabilitas, Panti yang diberikan bantuan permakanan	80 Orang, 30 Orang, 4 Panti	210.666.800	80 Orang, 30 Orang, 4 Panti	203.930.330	100	96,80
2	Penyediaan Alat Bantu	Alat bantu bagi penyandang disabilitas	6 Orang	54.992.500	5 Orang	54.655.000	83,33	99,39
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasikeluarga lanjut usia terlantar, Pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas	20 Orang, 15 Orang	132.000.000	20 Orang, 15 Orang	126.500.000	100	95,83
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	□ Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada anak terlantar □ Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas	10 orang , 6 orang	67.113.200	10 orang , 6 orang	54.058.380	100	80,55
b.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan rehabilitasi sosial	100%	179.780.900	100%	139.699.889	100	77,71
1	Penyediaan Permakanan	Pemberian permakanan pada orang terlantar	18 orang	5.775.000	12 orang	2.722.500	66,67	47,14
2	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya penelusuran keluarga PMKS di luar panti	100%	174.005.900	100%	136.977.389	100	78,72
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100	408.210.800	100	402.431.275	100	98,58

7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53	284.039.940	57,81	243.508.900	100	85,73
a.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan PUG	1 lembaga	284.039.940	1 lembaga	243.508.900	100	85,73
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<input type="checkbox"/> Terlaksananya program kerja organisasi perempuan <input type="checkbox"/> Kelembagaan PUG	1 organisasi, 1 lembaga	284.039.940	1 organisasi, 1 lembaga	243.508.900	100	85,73
8	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,5	511.202.700	6,85	177.144.950	124,55	34,65
a.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak	1 lembaga	52.230.000	1 lembaga	51.775.350	100	99,13
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	<input type="checkbox"/> Terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak <input type="checkbox"/> Terlaksananya webinar perlindungan perempuan dan anak <input type="checkbox"/> Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor <input type="checkbox"/> Tersedianya materi KIE	1 kali 4 kali 2 kali 1 materi	52.230.000	1 kali 4 kali 2 kali 1 materi	51.775.350	100	99,13
b.	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	3 lembaga	458.972.700	3 lembaga	125.369.600	100	27,32

1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<input type="checkbox"/> Jumlah lembaga <input type="checkbox"/> Operasional pendampingan pelayanan KtPA/TPPO	4 lembaga , 100%	82.827.700	3 lembaga , 100%	78.458.600	100	94,73
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	<input type="checkbox"/> Terfasilitasnya pelaksanaan visum dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk korban KtP/A <input type="checkbox"/> Terlaksananya pendampingan dan penjangkauan korban KtP/A <input type="checkbox"/> Terlaksananya pendampingan oleh tenaga ahli terhadap korban KtP/A	100%	376.145.000	100%	46.911.000	100	12,47
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	25	44.142.340	33,33	34.491.420	100	78,14
a.	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak	1 Dok	44.142.340	1 Dok	34.491.420	100	78,14
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Data terpilah dan informasi gender dan anak	1 Dok	44.142.340	1 Dok	34.491.420	100	78,14
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	128.231.550	Pratama	78.376.100	100,00	61,12
a.	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan status KLA	650 point	25.093.000	584 point	4.508.925	89,85	17,97
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya gugus tugas KLA	650 point	25.093.000	584 point	4.508.925	89,85	17,97

b.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Anak Kabupaten Belitung	1 organisasi	103.138.550	1 organisasi	73.867.175	100	71,62
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Anak	1 organisasi	87.032.700	1 organisasi	68.095.925	100	78,24
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Anak	1 organisasi	10.516.850	1 organisasi	5.771.250	100	54,88
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya gugus tugas KLA	650 point	5.589.000	584 point	-	89,85	0,00
11	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan anak korban kekerasan	100	65.783.525	100	57.140.125	100,00	86,86
a.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	100	65.783.525	100	57.140.125	100	86,86
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek	50 orang	58.239.425	50 orang	51.379.275	100	88,22

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<input type="checkbox"/> Jumlah peserta bimtek <input type="checkbox"/> Terbinanya PATBM di Desa/ Kel	50 orang, 10 Desa/ Kel	7.544.100	50 orang, 10 Desa/ Kel	5.760.850	100	76,36
J U M L A H			100	8.545.324.388	99,39	7.727.029.736	99,39	90,42

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2021
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
PERIODE BULAN DESEMBER 2021

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	FLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	KET
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PENYEDIA, NOMOR, TGL)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA, NOMOR, TGL)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANDEMEN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			5.133.719.188	5.377.236.288	-	-	-	5.377.236.288	-	5.308.730.111	98,73	100,00	68.506.177	1,27		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.839.200	5.839.200	-	-	-	5.839.200	-	5.820.200	99,67	100,00	19.000	0,33		
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3.000.000	-	2.994.000	99,80	100,00	6.000	0,20		
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.839.200	2.839.200	Swakelola (Penyedia)	-	-	2.839.200	-	2.826.200	99,54	100,00	13.000	0,46		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.233.832.088	4.578.045.088				4.578.045.088	-	4.574.863.849	99,93	100,00	3.181.239	0,07		
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.230.852.888	4.575.065.888	Swakelola (Penyedia)	-	-	4.575.065.888	-	4.571.888.849	99,93	100,00	3.177.039	0,07		
4		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.979.200	2.979.200	Swakelola (Penyedia)	-	-	2.979.200	-	2.975.000	99,86	100,00	4.200	0,14		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		411.195.900	293.500.000				293.500.000	-	246.961.853	84,14	100,00	46.538.147	15,86		
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	9.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	9.000.000	-	8.920.000	99,11	100,00	80.000	0,89		
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.246.900	88.227.500	Swakelola (Penyedia)	-	-	88.227.500	-	87.522.800	99,20	100,00	704.700	0,80		
7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	14.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	14.000.000	-	13.967.800	99,77	100,00	32.200	0,23		
8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.051.000	104.374.500	Swakelola (Penyedia)	-	-	104.374.500	-	81.806.250	78,38	100,00	22.568.250	21,62		
9		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.398.000	28.398.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	28.398.000	-	28.383.800	99,95	100,00	14.200	0,05		
10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.500.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	4.500.000	-	4.420.000	98,22	100,00	80.000	1,78		
11		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000.000	45.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	45.000.000	-	21.941.203	48,76	100,00	23.058.797	51,24		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		219.550.000	219.550.000				219.550.000	-	213.908.409	97,43	100,00	5.641.591	2,57		
12		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.950.000	2.950.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	2.950.000	-	2.140.400	72,56	100,00	809.600	27,44		
13		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	51.600.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	51.600.000	-	46.768.009	90,64	100,00	4.831.991	9,36		
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	165.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	165.000.000	-	165.000.000	100,00	100,00	-	0,00		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		263.302.000	280.302.000				280.302.000	-	267.175.800	95,32	100,00	13.126.200	4,68		
15		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.750.000	126.750.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	126.750.000	-	114.812.800	90,58	100,00	11.937.200	9,42		
16		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.420.000	27.420.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	27.420.000	-	26.393.000	96,25	100,00	1.027.000	3,75		
17		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.132.000	126.132.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	126.132.000	-	125.970.000	99,87	100,00	162.000	0,13		

2.	Program Pemberdayaan Sosial			575.220.985	487.712.385				487.712.385	-	307.212.400	62,99	95,00	180.499.985	37,01		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		575.220.985	487.712.385				487.712.385	-	307.212.400	62,99	95,00	180.499.985	37,01		
18		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	219.690.475	158.929.475	Swakelola (Penyedia)	-	-	158.929.475	-	139.931.410	88,05	100,00	18.998.065	11,95		
19		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	103.104.800	236.570.350	Swakelola (Penyedia)	-	-	236.570.350	-	99.997.550	42,27	90,00	136.572.800	57,73		
20		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	163.483.100	24.574.200	Swakelola (Penyedia)	-	-	24.574.200	-	9.693.250	39,44	90,00	14.880.950	60,56		
21		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	88.942.610	67.638.360	Swakelola (Penyedia)	-	-	67.638.360	-	57.590.190	85,14	100,00	10.048.170	14,86		
3.	Program Rehabilitasi Sosial			789.007.350	644.553.400				644.553.400	-	578.843.599	89,81	100,00	65.709.801	10,19		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		526.988.950	464.772.500				464.772.500	-	439.143.710	94,49	100,00	25.628.790	5,51		
22		Penyediaan Perumahan	Penyediaan Perumahan	210.666.800	210.666.800	Swakelola (Penyedia)	-	-	210.666.800	-	203.930.330	96,80	100,00	6.736.470	3,20		
23		Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	54.992.500	54.992.500	Swakelola (Penyedia)	-	-	54.992.500	-	54.655.000	99,39	100,00	337.500	0,61		
24		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	132.000.000	132.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	132.000.000	-	126.500.000	95,83	100,00	5.500.000	4,17		
25		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	129.329.650	67.113.200	Swakelola (Penyedia)	-	-	67.113.200	-	54.058.380	80,55	100,00	13.054.820	19,45		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		262.018.400	179.780.900				179.780.900	-	139.699.889	77,71	100,00	40.081.011	22,29		
26		Penyediaan Perumahan	Penyediaan Perumahan	7.012.500	5.775.000	Swakelola	-	-	5.775.000	-	2.722.500	47,14	100,00	3.052.500	52,86		
27		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	255.005.900	174.005.900	Swakelola (Penyedia)	-	-	174.005.900	-	136.977.389	78,72	100,00	37.028.511	21,28		
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			408.296.850	408.210.800				408.210.800	-	402.431.275	98,58	100,00	5.779.525	1,42		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		408.296.850	408.210.800				408.210.800	-	402.431.275	98,58	100,00	5.779.525	1,42		
28		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.296.850	408.210.800	Swakelola (Penyedia)	-	-	408.210.800	-	402.431.275	98,58	100,00	5.779.525	1,42		
5.	Program Penanganan Bencana			589.324.860	589.319.860				589.319.860	-	537.086.356	91,14	100,00	52.233.504	8,86		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		589.324.860	589.319.860				589.319.860	-	537.086.356	91,14	100,00	52.233.504	8,86		
29		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	589.324.860	589.319.860	Swakelola (Penyedia)	-	-	589.319.860	-	537.086.356	91,14	100,00	52.233.504	8,86		
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			4.891.600	4.891.600				4.891.600	-	2.064.500	42,21	100,00	2.827.100	57,79		

		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		4.891.600	4.891.600				4.891.600	-	2.064.500	42,21	100,00	2.827.100	57,79		
30		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.891.600	4.891.600	Swakelola (Penyedia)		-	4.891.600	-	2.064.500	42,21	100,00	2.827.100	57,79		
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			338.965.440	284.039.940				284.039.940	-	243.508.900	85,73	95,00	40.531.040	14,27		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		338.965.440	284.039.940				284.039.940	-	243.508.900	85,73	95,00	40.531.040	14,27		
31		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	338.965.440	284.039.940	Swakelola (Penyedia)		-	284.039.940	-	243.508.900	85,73	95,00	40.531.040	14,27		
8.	Program Perlindungan Perempuan			476.573.400	511.202.700				511.202.700	-	177.144.950	34,65	100,00	334.057.750	65,35		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		-	52.230.000				52.230.000	-	51.775.350	99,13	100,00	454.650	0,87		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-	52.230.000	Swakelola (Penyedia)			52.230.000	-	51.775.350	99,13	100,00	454.650	0,87		
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		476.573.400	458.972.700				458.972.700	-	125.369.600	27,32	100,00	333.603.100	72,68		
32		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	476.573.400	82.827.700	Swakelola (Penyedia)		-	82.827.700	-	78.458.600	94,73	100,00	4.369.100	5,27		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	376.145.000	Swakelola (Penyedia)			376.145.000	-	46.911.000	12,47	100,00	329.234.000	87,53		
9.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			44.142.340	44.142.340				44.142.340	-	34.491.420	78,14	100,00	9.650.920	21,86		
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		44.142.340	44.142.340				44.142.340	-	34.491.420	78,14	100,00	9.650.920	21,86		
33		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.142.340	44.142.340	Swakelola (Penyedia)		-	44.142.340	-	34.491.420	78,14	100,00	9.650.920	21,86		
10.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			302.953.100	128.231.550				128.231.550	-	78.376.100	61,12	100,00	49.855.450	38,88		
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		25.093.000	25.093.000				25.093.000	-	4.508.925	17,97	100,00	20.584.075	82,03		
34		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.093.000	25.093.000	Swakelola (Penyedia)		-	25.093.000	-	4.508.925	17,97	100,00	20.584.075	82,03		

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		277.860.100	103.138.550				103.138.550	-	73.867.175	71,62	100,00	29.271.375	28,38		
35		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	228.751.800	87.032.700	Swakelola (Penyedia)	-	-	87.032.700	-	68.095.925	78,24	100,00	18.936.775	21,76		
36		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.516.850	10.516.850	Swakelola (Penyedia)	-	-	10.516.850	-	5.771.250	54,88	100,00	4.745.600	45,12		
37		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.591.450	5.589.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	5.589.000	-	-	0,00	100,00	5.589.000	100,00		
11.	Program Perlindungan Khusus Anak			69.055.925	65.783.525				65.783.525	-	57.140.125	86,86	100,00	8.643.400	13,14		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		69.055.925	65.783.525				65.783.525	-	57.140.125	86,86	100,00	8.643.400	13,14		
38		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.511.825	58.239.425	Swakelola (Penyedia)	-	-	58.239.425	-	51.379.275	88,22	100,00	6.860.150	11,78		
39		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.544.100	7.544.100	Swakelola (Penyedia)	-	-	7.544.100	-	5.760.850	76,36	100,00	1.783.250	23,64		
		T O T A L		8.732.151.038	8.545.324.388				8.545.324.388	-	7.727.029.736	90,42	99,39	818.294.652	9,58		



